

BAGIAN ANGGARAN 065



**LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
AUDITED
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta Selatan 12190

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 08 MAY 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosan Perkasa Roeslani

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	67
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	77
F. Pengungkapan Penting Lainnya	80
VI. Lampiran dan Daftar	84



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 (AUDITED)**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (*Audited*) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan. Semua Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, **05 MAY 2026**

Inspektur



Kukuh Agung Pribadi, S.E.

NIP. 196808171988031003



MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal *Audited* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 08 MAY 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosan Perkasa Roeslani

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.286.408.600,00 atau mencapai 1.156,23 persen dari estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp457.212.000,00. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 seluruhnya berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp807.238.614.076,00 atau mencapai 91,77 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp879.611.122.000,00.

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.354.654.818.267,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp12.140.665.760,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.264.174.622.929,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp78.339.529.578,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp63.297.619.762,00 dan Rp2.291.357.198.505,00.

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp766.674.831,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional

adalah sebesar Rp825.019.620.646,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(824.252.945.815,00).

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp2.322.219.902,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(821.930.725.913,00).

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp2.311.950.043.091,00, dikurangi dengan Surplus/(Defisit)-LO sebesar sebesar Rp(821.930.725.913,00), dikurangi dengan Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp(614.324.149,00) dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp801.952.205.476,00 sehingga nilai Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.291.357.198.505,00.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		457.212.000	5.286.408.600	1.156,23	8.442.627.534
JUMLAH PENDAPATAN		457.212.000	5.286.408.600	1.156,23	8.442.627.534
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	302.166.254.000	295.470.452.875	97,78	241.176.060.270
Belanja Barang	B.4	435.325.216.000	400.551.394.049	92,01	814.685.758.812
Belanja Modal	B.5	142.119.652.000	111.216.767.152	78,26	91.880.046.583
JUMLAH BELANJA		879.611.122.000	807.238.614.076	91,77	1.147.741.865.665

Jakarta,

08 MAY 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosan Perkasa Roeslani

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	121.871.588	104.475.690
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	718.886.694	503.240.777
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3	10.283.609.537	26.479.577.654
Piutang Bukan Pajak	C.4	40.090.961	7.090.354
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.5	(200.455)	-
Persediaan	C.6	976.407.435	1.262.051.465
Jumlah Aset Lancar		12.140.665.760	28.356.435.940
ASET TETAP			
Tanah	C.7	1.959.546.919.000	1.959.546.919.000
Peralatan dan Mesin	C.8	427.839.805.746	380.253.431.212
Gedung dan Bangunan	C.9	298.666.132.596	294.993.064.951
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.10	9.022.115.183	9.022.115.183
Aset Tetap Lainnya	C.11	1.660.612.849	1.510.762.849
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.12	3.274.500.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.13	(435.835.462.445)	(407.191.399.711)
Jumlah Aset Tetap		2.264.174.622.929	2.238.134.893.484
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.14	189.371.924.224	145.278.190.394
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.15	61.043.465.915	78.629.147.521
Aset Lain-lain	C.16	7.707.945.738	24.264.826.079
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.17	(179.783.806.299)	(124.456.192.669)
Jumlah Aset Lainnya		78.339.529.578	123.715.971.325
JUMLAH ASET		2.354.654.818.267	2.390.207.300.749
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.18	62.395.240.982	77.075.313.679
Pendapatan Diterima di Muka	C.19	780.402.844	1.076.086.105
Uang Muka dari KPPN	C.20	121.871.588	104.475.690
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.21	104.348	1.382.184
JUMLAH KEWAJIBAN		63.297.619.762	78.257.257.658
EKUITAS			
Ekuitas	C.22	2.291.357.198.505	2.311.950.043.091
JUMLAH EKUITAS		2.291.357.198.505	2.311.950.043.091
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.354.654.818.267	2.390.207.300.749

Jakarta, 08 MAY 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Rosah Perkasa Roeslani

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	766.674.831	798.282.016
JUMLAH PENDAPATAN		766.674.831	798.282.016
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	295.539.105.210	240.921.172.808
Beban Persediaan	D.3	2.838.299.158	4.402.439.685
Beban Barang dan Jasa	D.4	327.960.122.658	568.904.361.616
Beban Pemeliharaan	D.5	14.393.081.891	15.873.066.245
Beban Perjalanan Dinas	D.6	67.264.399.486	202.175.321.588
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	117.024.423.052	91.521.216.230
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	189.191	-
JUMLAH BEBAN		825.019.620.646	1.123.797.578.172
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(824.252.945.815)	(1.122.999.296.156)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.9		
PENDAPATAN			
		2.403.445.020	7.863.292.850
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		33.015.000	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Ops Lainnya		2.370.430.020	7.863.292.850
BEBAN		81.225.118	4.509.881.176
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		79.759.447	3.841.653.213
Beban dari Kegiatan Non Ops Lainnya		1.465.671	668.227.963
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.322.219.902	3.353.411.674
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(821.930.725.913)	(1.119.645.884.482)
POS LUAR BIASA			
SURPLUS/DEFISIT LO		(821.930.725.913)	(1.119.645.884.482)

Jakarta,

08 MAY 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosan Perkasa Roeslani

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	2.311.950.043.091	2.288.895.571.531
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(821.930.725.913)	(1.119.645.884.482)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(614.324.149)	(736.047.089)
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.6	(614.312.885)	(316.903.265)
Koreksi Lain-lain	E.7	(11.264)	(419.143.824)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	801.952.205.476	1.143.436.403.131
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(20.592.844.586)	23.054.471.560
EKUITAS AKHIR	E.9	2.291.357.198.505	2.311.950.043.091

Jakarta, **08 MAY 2026**
 Menteri Investasi dan Hilirisasi/
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosah Perkasa Roeslani

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal

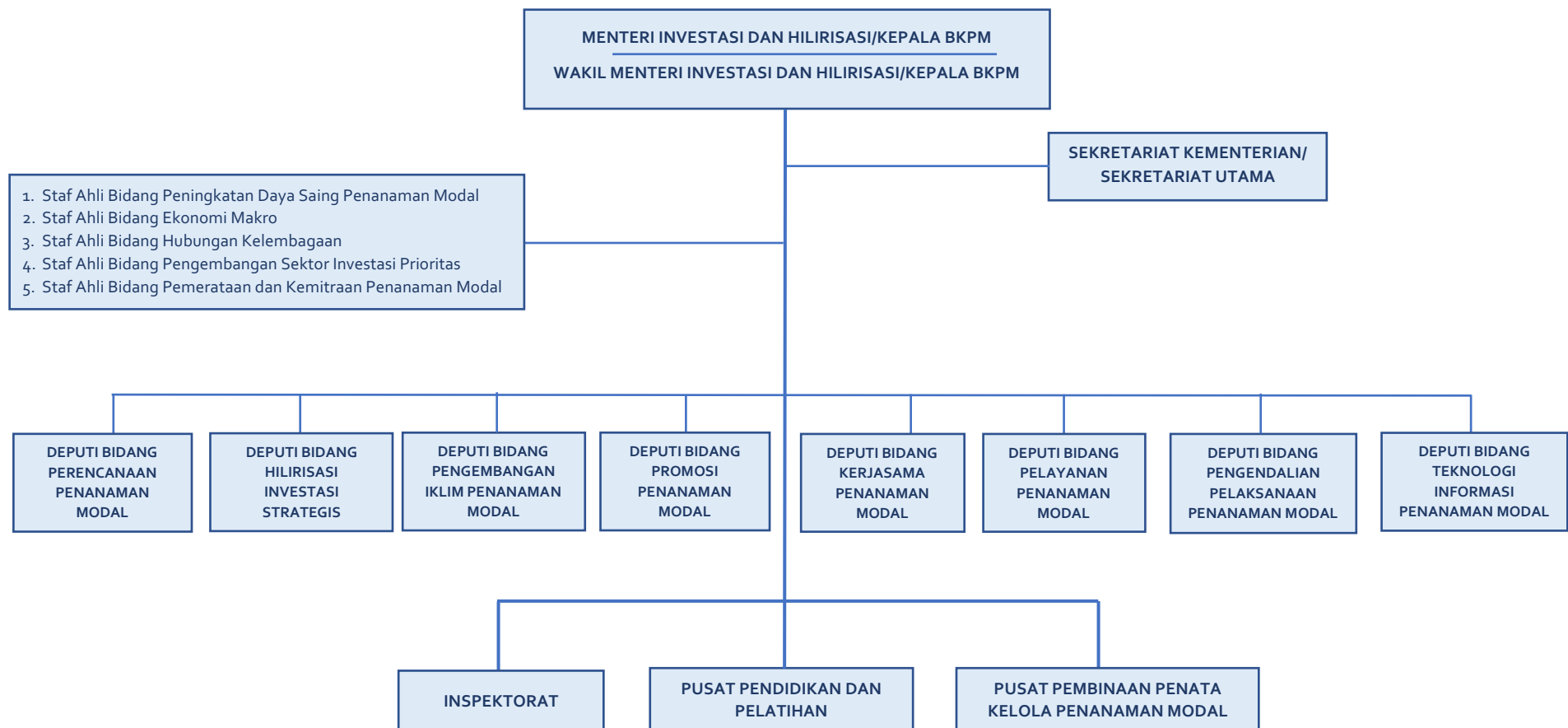
Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaksanakan tugas dan kewenangan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal resmi ditetapkan sebagai Kementerian Negara dengan nama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 Tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berubah nomenklatur menjadi **Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal**.

Struktur organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan susunan kelembagaan sebagaimana dapat dilihat pada Bagan 1 sebagai berikut:

Bagan A.1.

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional maka Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menetapkan visi dan misi yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yaitu:

VISI

Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berperan dalam pencapaian misi Nomor 2 (dua), 5 (lima), dan 7 (Tujuh) dari 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam "Asta Cita" sebagai berikut:

MISI

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. **Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;**
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas;
5. **Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;**
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan;** dan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rumusan misi untuk mewujudkan visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 tersebut diatas adalah:

Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diharapkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri” sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2025-2029. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang tinggi, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata; dan
2. Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima.

Selanjutnya dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
- f. mempromosikan penanaman modal;

- g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
- j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

TARGET SASARAN STRATEGIS

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM T.A. 2025

Seluruh pelaksanaan kegiatan dan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kemudian dituangkan dalam target kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel A.1.

TARGET KINERJA

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata			
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder - (Rp Triliun)	855,90	780,9
2	Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi – (Rp Triliun)	521,40	584,1
3	Persentase Realisasi PMDN termasuk UMKM – (Persen)	48,30	53,4
4	Nilai PMA Berorientasi Ekspor - (Rp Triliun)	171,60	135,8
5	Nilai PMDN Berorientasi Ekspor - (Rp Triliun)	60,40	58,3
6	Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan - (Rp Triliun)	307,10	445,8
7	Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa – (Persen)	52,10	51,3

No	Indikator Kinerja	Target	
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif, serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima			
8	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	76,20	76,12

Keterkaitan antara sasaran strategis dengan program kerja dan realisasi penyerapan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sampai dengan periode 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel A.2.

REALISASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Program Kerja	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Program Penanaman Modal	Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata	398.583.284.000	338.720.645.916	85,00
2	Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif, serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima	481.027.838.000	468.517.968.160	97,53
JUMLAH			879.611.122.000	807.238.614.076	91,77

PENGELOLAAN APBN TAHUN 2025

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merupakan entitas akuntansi yang memiliki 46 (empat puluh enam) Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari 9 (sembilan) Satker Pusat dan 37 (tiga puluh tujuh) Satker Dekonsentrasi dengan rincian sebagai berikut:

SATKER PUSAT		
No	Kode Satker	Nama Satker
1	017202	Sekretariat Utama/Sekretariat Kementerian
2	650102	Deputi Bidang Hilirisasi Informasi Strategis
3	650103	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

SATKER PUSAT		
4	664848	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
5	664852	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
6	664869	Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal
7	664873	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
8	664880	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
9	670650	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
SATKER DEKONSENTRASI		
No	Kode Satker	Nama Satker
1	029002	DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
2	039002	DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
3	049001	DPMPTSP Provinsi DIY
4	050016	DPMPTSP Provinsi Jawa Timur
5	060038	DPMPTSP Nanggroe Aceh Darussalam
6	079001	DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara
7	080022	DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat
8	099001	DPMPTSP Provinsi Riau
9	100098	DPMPTSP Provinsi Jambi
10	119002	DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan
11	120020	DPMPTSP Provinsi Lampung
12	139001	DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat
13	140020	DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah
14	159002	DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan
15	169001	DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
16	170029	DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara
17	180015	DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
18	190099	DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan
19	200028	DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara
20	210023	DPMPTSP Provinsi Maluku
21	220022	DPMPTSP Provinsi Bali
22	230024	DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat
23	249002	DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur
24	260028	DPMPTSP Provinsi Bengkulu
25	280023	DPMPTSP Provinsi Maluku Utara
26	290018	DPMPTSP Provinsi Banten
27	300015	DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
28	310090	DPMPTSP Provinsi Gorontalo
29	320082	DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau
30	330082	DPMPTSP Provinsi Papua Barat
31	340096	DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat
32	417745	DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara
33	650101	DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
34	690916	DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya
35	690917	DPMPTSP Provinsi Papua Selatan
36	690918	DPMPTSP Provinsi Papua Tengah
37	690919	DPMPTSP Provinsi Papua Pegunungan

Dalam perkembangannya, pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang mengakibatkan anggaran Satker Dekonsentrasi di blokir seluruhnya sebesar 100 persen. Selanjutnya pada Triwulan III dilakukan penghapusan anggaran untuk seluruh Satker Dekonsentrasi sehingga menjadi Satker Inaktif Tidak Bersaldo. Atas kondisi tersebut maka Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 merupakan Laporan Keuangan yang dihasilkan dari konsolidasi Laporan Keuangan pada 9 (sembilan) Satker Pusat. Adapun terhadap transaksi setoran pengembalian belanja yang dilakukan oleh Satker Dekonsentrasi selama periode tahun 2025 tetap dibukukan dan disajikan dalam Laporan Keuangan ini.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Penggunaan aplikasi meliputi tahapan pengelolaan keuangan sejak perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran, dan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Barang Milik Negara.

A.3. Basis Akuntansi

Basis
Akuntansi

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Penerapan ini sejalan dengan prinsip dan kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam PMK Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Penerapan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) dimaksud telah konsisten dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar
Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan
Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

Pendapatan -
LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi dan jenis pendapatannya.

(2) Pendapatan - LO

Pendapatan -
LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat telah timbul hak untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis beban dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan pada Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk mata uang asing disajikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antarpemerintahan dan kerugian negara serta, transaksi lainnya.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, penyisihan ditetapkan sebesar:

Tabel A.3.

PENYISIHAN PIUTANG

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan nilai pos piutang pada Neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, dan piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti Piutang TKD.
- Nilai Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya. Untuk mendapatkan nilai persediaan yang lebih wajar, mulai tahun 2021, secara prospektif penilaian persediaan menggunakan metode *First in First out* (FIFO). Dalam rangka penyajian persediaan untuk pelaporan keuangan, Satker melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) minimal setiap akhir semester. Pemakaian persediaan kemudian dihitung berdasarkan saldo awal ditambah pembelian atau perolehan persediaan lalu dikurangi dengan saldo akhir persediaan.

b. Aset Tetap

- Aset Tetap meliputi aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan tidak dapat diidentifikasi, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu

- juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol.
- Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada Pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

C. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan Beban Penyusutan dalam LO.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.4.
MASA MANFAAT ASET TETAP

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan)	4 tahun

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Uang Muka Rekening BUN, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.5.
MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i> Komputer	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan
pagu
anggaran

Pagu Anggaran yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp879.611.122.000,00. Rincian pagu anggaran berdasarkan jenis belanja disajikan sebagai berikut:

Tabel B.1.

Pagu Anggaran per Jenis Belanja TA. 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	TA. 2025	
	Pagu Awal	Pagu Perubahan
Belanja Pegawai	252.291.969.000	302.166.254.000
Belanja Barang	393.355.135.000	435.325.216.000
Belanja Modal	36.233.181.000	142.119.652.000
Jumlah	681.880.285.000	879.611.122.000

Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan program kerja, rincian pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah sebagai berikut:

Tabel B.2.

Pagu Anggaran per Program Kerja TA. 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian Program Kerja	Pagu Awal	Pagu Perubahan
Program Dukungan Manajemen	409.241.612.000	481.027.838.000
Program Penanaman Modal	272.638.673.000	398.583.284.000
Jumlah	681.880.285.000	879.611.122.000

Pada Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa revisi anggaran yang merubah jumlah anggaran pada level satuan kerja dan merubah pagu anggaran total Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dengan rincian sebagai berikut:

- I. Perubahan anggaran akibat adanya realokasi serta pergeseran anggaran terkait belanja pegawai berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-318/AG/AG.3/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Surat Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM TA 2025;
- II. Perubahan anggaran akibat realokasi dan optimalisasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-481/AG/AG.3/2025 tanggal 2 Juni 2025 hal Pengesahan Revisi

Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM TA 2025;

- III. Penambahan anggaran BA-BUN sebesar Rp197.730.837.000,00 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-553/AG/AG.3/2025 tanggal 25 Juni 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM TA 2025;
- IV. Perubahan anggaran akibat realokasi dan optimalisasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-632/AG/AG.3/2025 tanggal 28 Juli 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM TA 2025;
- V. Perubahan anggaran akibat realokasi dan optimalisasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-766/AG/AG.3/2025 tanggal 3 September 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM TA 2025; dan
- VI. Perubahan anggaran akibat realokasi dan optimalisasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-960/AG/AG.3/2025 tanggal 11 November 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM TA 2025.

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, masih terdapat blokir anggaran pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sesuai Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-960/AG/AG.3/2025 tanggal 11 November 2025 sebesar Rp16.752.578.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel B.3.
Pagu Blokir per Satuan Kerja TA. 2025

(Dalam Rupiah)

No	Satuan Kerja	Pagu Blokir
1	Sekretariat Utama	-
2	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.361.500.000
3	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	24.317.000
4	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	4.024.275.000
5	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	7.721.032.000
6	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-
7	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	952.627.000
8	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	1.668.827.000
9	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	-
Total		16.752.578.000

Sampai dengan 31 Desember 2025 hanya Satker Pusat yang memiliki pagu anggaran sementara untuk Satker Dekonsentrasi pagu anggaran yang sebelumnya diblokir 100 persen dihapus seluruhnya berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 768/A.3/B.1/2025 tanggal 30 Oktober 2025 hal Usulan Revisi Anggaran TA 2025. Pagu anggaran pada Satuan Kerja Dekonsentrasi dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan relaksasi anggaran pada Satker Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Rincian perubahan alokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat dalam tabel pada **Lampiran 1**.

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.286.408.600,00 atau mencapai 1.156,23 persen dari estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp457.212.000,00.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel B.1.1.
Estimasi dan Realisasi Pendapatan s.d. 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	457.212.000	5.286.408.600	1.156,23
Jumlah	457.212.000	5.286.408.600	1.156,23

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp5.286.408.600,00 seluruhnya berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	33.015.000
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	457.212.000
3	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	45.618.026
4	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	790.591
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	232.183.798
6	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4.498.175.064

No	Uraian	Jumlah
7	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	6.474.600
8	Pendapatan Anggaran Lain-lain	12.939.521
Total		5.286.408.600

1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp33.015.000,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa penerimaan Lelang atas penjualan Barang Milik Negara (BMN) dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil lelang atas 34 (tiga puluh empat) unit inventaris kantor dalam kondisi rusak berat sebesar Rp3.500.000,00 berdasarkan risalah lelang nomor 199/07.01/2025-01 tanggal 16 September 2025.
- Hasil lelang atas 1 (satu) unit server San Storage dalam kondisi rusak berat sebesar Rp1.423.000,00 berdasarkan risalah lelang nomor 199/07.01/2025-01 tanggal 16 September 2025.
- Hasil lelang atas 4 (empat) unit firewall, 2 (dua) unit switch, dan 10 (sepuluh) unit peralatan jaringan lainnya dalam kondisi rusak berat sebesar Rp1.720.000,00 berdasarkan risalah lelang nomor 281/07.01/2025-01 tanggal 20 November 2025.
- Hasil lelang atas 1 (satu) unit gondola, 8 (delapan) unit video wall, 1 (satu) unit videotron, dan 1 (satu) unit audio visual dalam kondisi rusak berat sebesar Rp26.372.000,00 berdasarkan risalah lelang nomor 328/07.01/2025-01 tanggal 18 Desember 2025.

2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp457.212.000,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa penerimaan pembayaran sewa ruang dari PT Bank Negara Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Sewa pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor S-54/MK.6/KNL.0701/2025 tanggal 17 Februari 2025.

3. Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN

Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp45.618.026,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa:

- a) Pengembalian *No Claim Bonus* atas Polis Asuransi BMN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM No Polis 201.235.110.22.00071/000/000 TA 2022 sebesar Rp4.478.928,00;
- b) Pengembalian *No Claim Bonus* atas Polis Asuransi BMN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM No Polis 204.235.110.23.00028/000/000 TA 2023 sebesar Rp17.915.711,00; dan
- c) Pengembalian *No Claim Bonus* atas Polis Asuransi BMN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM No Polis 204.235.110.24.00024/000/000 TA 2024 sebesar Rp23.223.387,00.

4. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp790.591,00 berasal dari pendapatan bunga rekening pemerintah pada Satker Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal yang dengan rincian:

- a) Pendapatan bunga rekening IIPC Seoul senilai Rp311.862,00;
- b) Pendapatan bunga rekening IIPC Taipei senilai Rp381.340,00;
- c) Pendapatan bunga rekening IIPC London senilai Rp74.230,00; dan
- d) Pendapatan bunga rekening IIPC Tokyo senilai Rp23.159,00.

4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp232.183.798,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Tahun 2024 yang antara lain terdiri dari gaji dan tunjangan, serta honorarium tetap yang baru disetorkan di Tahun 2025.

5. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp4.498.175.064,00 berasal dari pengembalian belanja barang TA 2024 yang baru disetorkan di Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Satker Sekretariat Utama sebesar Rp767.074.415,00 berupa:
 - a) Pengembalian kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp60.495.934,00;
 - b) Pengembalian kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp6.250.000,00;
 - c) Penihilan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) atas Kontrak Nomor 02/SP/PPK-BKLI/PIP-PM/V/2024 untuk pekerjaan Kegiatan Penyebaran Informasi Publik Penanaman Modal T.A. 2024 sebesar Rp141.549.550,00; dan

- d) Pengembalian kelebihan pembayaran atas kegiatan Layanan *Manage Service Contact Center* Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp558.778.931,00.
- b. Satker Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal sebesar Rp3.250.350.412,00 berupa:
 - a) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Minat Investasi Perusahaan PMA dan PMDN serta Minat Relokasi/Diversifikasi Geografis Perusahaan Asing ke Indonesia TA. 2024 sebesar Rp20.380.160,00;
 - b) Pengembalian kelebihan pembayaran barang berupa Deposit Sewa Venue World Economic Forum (WEF) 2025 di Davos sebesar Rp363.987.000,00;
 - c) Penihilan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) atas Kontrak Nomor 08/SP/PPK-DPPM/ANALISIS-MI/VIII/2024 untuk Kegiatan Analisis Market Intelligence Negara dan Sektor Prioritas Promosi Investasi sebesar Rp279.359.250,00; dan
 - d) Penihilan RPATA atas Kontrak Nomor 04/SP/PPK-DPPM/RELOKASI/V/2024 untuk Kegiatan Fasilitas Minat Investasi Perusahaan PMA dan PMDN serta Minat Relokasi/Diversifikasi Geografis Perusahaan Asing ke Indonesia sebesar Rp2.586.624.002,00.
- c. Satker Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp14.160.000,00 seluruhnya berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran atas Kegiatan Peningkatan Kinerja PTSP dan Kinerja Percepatan Perizinan Berusaha Pemerintah Daerah TA. 2024.
- d. Satker Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp245.844.698,00 berupa:
 - a) Pengembalian kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp5.878.128,00;
 - b) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Eksekusi Realisasi Investasi Proyek Strategis Terkendala Wilayah Barat dan Wilayah Timur TA. 2024 sebesar Rp70.451.640,00;
 - c) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Pengadaan Jasa Konsultan Eksekusi Realisasi Investasi Bagi Perusahaan Penerima Fasilitas Penanaman Modal TA. 2024 sebesar Rp43.125.500,00;
 - d) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Pengadaan Jasa Konsultan Eksekusi Realisasi Investasi Bagi Perusahaan

- Penerima Fasilitas Penanaman Modal TA. 2024 sebesar Rp98.562.540,00;
- e) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM TA. 2024 sebesar Rp17.705.401,00; dan
 - f) Pengembalian kelebihan Pekerjaan Jasa Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko TA. 2024 sebesar Rp10.121.489,00.
- e. Satker Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal sebesar Rp20.721.747,00 yang berasal dari:
- a) Pengembalian kelebihan pekerjaan kegiatan Peningkatan Kinerja PTSP dan Kinerja Percepatan Perizinan Berusaha Pemerintah Daerah TA. 2024 sebesar Rp1.570.000; dan
 - b) Penihilan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) atas Kontrak Nomor 01/SP/PPK-PPM/RUPM/VI/2024 untuk Penyusunan Background Study Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebesar Rp19.151.747,00.
- f. Satker Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal sebesar Rp15.670.000,00 seluruhnya berasal dari Pengembalian kelebihan belanja atas Jasa Konsultansi Penilaian Kinerja TA. 2024.
- g. Satker Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp173.517.456,00 berasal dari:
- a) Pengembalian Honorarium Tim Kegiatan Penyusunan Memo Info TA. 2024 a.n. Dirghayusa Adhimukti sebesar Rp3.562.500,00; dan
 - b) Pengembalian Belanja Bahan atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyelenggaraan Kegiatan RAKORNAS Investasi TA 2024 sebesar Rp169.954.956,00.
- h. Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp4.347.000,00 seluruhnya berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran Honor Pengelola Dana Dekonsentrasi TA. 2024;
- i. Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp495.000,00 seluruhnya berasal dari pengembalian pembayaran perjalanan dinas TA. 2024;
- j. Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku sebesar Rp802.000,00 seluruhnya berasal dari Pengembalian

kelebihan pembayaran Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Instansi (SAI) TA. 2024;

- k. Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp500.000,00 seluruhnya berasal dari pengembalian pembayaran perjalanan dinas TA. 2024;
- l. Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten sebesar Rp3.018.800,00 seluruhnya berasal dari pengembalian pembayaran perjalanan dinas TA. 2024;
- m. Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp109.500,00 seluruhnya berasal dari pengembalian pembayaran perjalanan dinas TA. 2024;
- n. Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp1.071.500,00 seluruhnya berasal dari Pengembalian Belanja TA. 2024 berdasarkan hasil temuan Inspektorat Jenderal Provinsi Sulawesi Barat terkait perjalanan dinas;
- o. Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp492.536,00 seluruhnya dari pengembalian pembayaran perjalanan dinas TA. 2024; dan

6. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp6.474.600,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama berupa setoran dari Sisa Utang TP/TGR pegawai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang disetorkan melalui PT Taspen Persero.

7. Pendapatan Anggaran Lain-lain

Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp12.939.521,00 seluruhnya berasal dari Satker Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal yang terdiri dari penerimaan atas Pengembalian Deposit Sewa *Venue* WEF Davos 2025 sebesar Rp11.583.000,00 dan Pengembalian atas kelebihan Uang Muka Kerja (UMK) pada IIPC sebesar Rp1.356.521,00.

Rincian Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 bila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 37,38 persen.

Tabel B.1.2.
Perbandingan Realisasi Pendapatan s.d 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024	% Naik/ (Turun)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	33.015.000	-	100,00
Pendapatan Sewa, Tanah, Gedung, dan Bangunan	457.212.000	67.392.000	578,44
Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	45.618.026	-	100
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	790.591	388.132	103,69
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	35.908.470	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	232.183.798	140.071.514	65,76
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	4.498.175.064	8.198.864.424	(45,14)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	6.474.600	-	100,00
Pendapatan Lain-lain	12.939.521	2.994	432.081,73
Jumlah	5.286.408.600	8.442.627.534	(37,38)

Penurunan pendapatan pada periode sampai dengan 31 Desember 2025 sebagian besar berasal dari penurunan nilai Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL.

B.2 Belanja

Belanja Rupiah Murni

Realisasi
Belanja
Negara

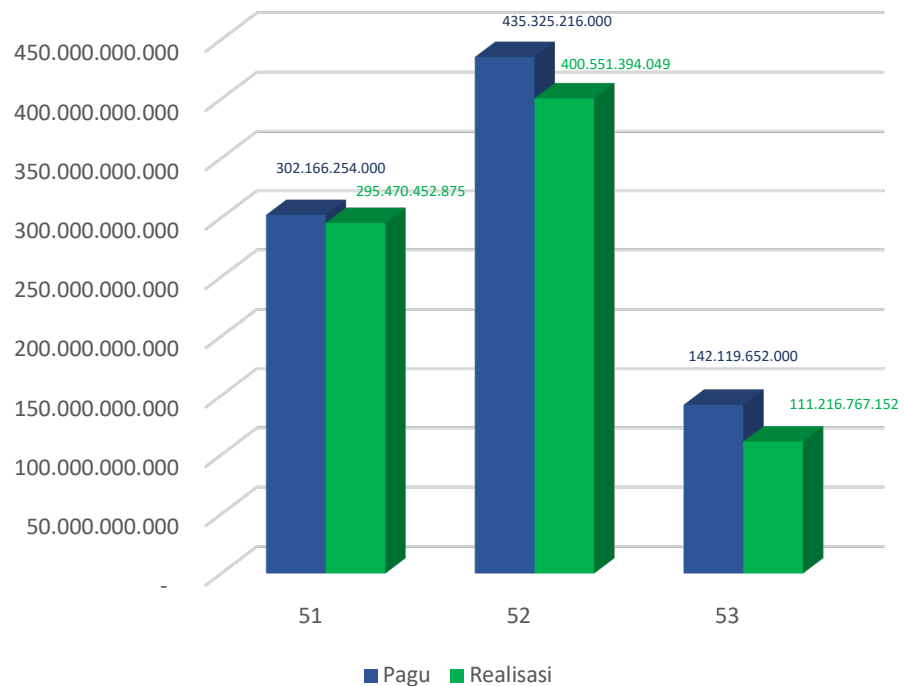
Realisasi Belanja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp807.238.614.076,00 atau mencapai 91,77 persen dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp879.611.122.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel B.2.1.
Pagu dan Realisasi per Jenis Belanja s.d 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	302.166.254.000	295.470.452.875	97,78
Belanja Barang	435.325.216.000	400.551.394.049	92,01
Belanja Modal	142.119.652.000	111.216.767.152	78,26
Jumlah	879.611.122.000	807.238.614.076	91,77

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik B.2.1.**Anggaran dan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2025**
(dalam Rupiah)

Bila dibandingkan dengan posisi Tahun 2024 maka terdapat penurunan realisasi anggaran yang cukup signifikan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel B.2.2.**Perbandingan Realisasi Belanja s.d 31 Desember 2025 dan 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024	% Naik/ (Turun)
Belanja Pegawai	295.470.452.875	241.176.060.270	22,51
Belanja Barang	400.551.394.049	814.685.758.812	(50,83)
Belanja Modal	111.216.767.152	91.880.046.583	21,05
Jumlah	807.238.614.076	1.147.741.865.665	(29,67)

Penurunan realisasi anggaran sebesar 29,67 persen sebagian besar disebabkan penurunan realisasi belanja barang karena:

1. Kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi

Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sehingga pagu anggaran yang dikelola Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjadi menurun semula di Tahun 2024 sebesar Rp1.229.295.942.000,00 menjadi sebesar Rp879.611.122.000,00 pada tahun 2025. Penurunan ini secara tidak langsung mempengaruhi nilai penyerapan anggaran.

2. Terdapat blokir anggaran Belanja Barang yang tidak bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2025, sebesar Rp16.752.578.000,00 atau mencapai 1,90 persen dari total anggaran.

B.3 Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp295.470.452.875,00 dan Rp241.176.060.270,00. Realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 22,51 persen dari realisasi belanja pegawai di periode yang sama pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel B.3.1.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024	% Naik/ (Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	91.484.327.009	80.426.314.461	13,75
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	186.900.170	(100,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	2.578.403.120	1.110.741.400	132,13
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	3.134.014.752	1.080.172.770	190,14
Belanja Honorarium	8.770.382.763	7.579.961.747	15,70
Belanja Lembur	167.448.000	73.633.000	127,41
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai	189.922.682.291	151.338.553.231	25,50
Jumlah Belanja Kotor	296.057.257.935	241.796.276.779	22,44
Pengembalian Belanja	586.805.060	620.216.509	(5,39)
Jumlah	295.470.452.875	241.176.060.270	22,51

Peningkatan realisasi belanja pegawai antara lain berasal dari:

- i) Peningkatan belanja untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS, Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Belanja Honorarium, Belanja Lembur, dan Tunjangan Khusus akibat pengangkatan 109 (seratus sembilan) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Terhitung Mulai

Tanggal (TMT) 1 Juni 2025 dan 130 (seratus tiga puluh) PPPK TMT 1 Oktober 2025.

- ii) Peningkatan belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS disebabkan pengangkatan 5 (lima) Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi TMT 1 Maret 2025.

Rincian Pengembalian Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel B.3.2.

Rincian Realisasi Pengembalian Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi	Pengembalian Belanja	Realisasi Netto
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	91.484.327.009	569.965.118	90.914.361.891
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	2.578.403.120	0	2.578.403.120
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	3.134.014.752	1.074.600	3.132.940.152
Belanja Honorarium	8.770.382.763	0	8.770.382.763
Belanja Lembur	167.448.000	0	167.448.000
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	189.922.682.291	15.765.342	189.906.916.949
Jumlah	296.057.257.935	586.805.060	295.470.452.875

B.4 Belanja Barang

Belanja
Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp400.551.394.049,00 dan Rp814.685.758.812,00. Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 50,83 persen dari Realisasi Belanja Barang pada periode yang sama di Tahun Anggaran 2024.

Tabel B.4.1.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024	% Naik/(Turun)
Belanja Barang Operasional	45.939.200.934	45.642.387.074	0,65
Belanja Barang Non Operasional	25.347.416.404	55.860.771.011	(54,62)
Belanja Barang Persediaan	2.555.338.168	4.769.954.118	(46,43)
Belanja Jasa	243.576.800.563	490.881.255.437	(50,38)
Belanja Pemeliharaan	15.950.597.424	15.873.066.245	0,49
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	41.034.946.690	134.414.605.085	(69,47)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	26.268.400.984	67.855.088.759	(61,29)
Jumlah Belanja Kotor	400.672.701.167	815.297.127.729	(50,86)
Pengembalian Belanja	121.307.118	611.368.917	(81,68)
Jumlah	400.551.394.049	814.685.758.812	(50,83)

Penurunan belanja barang pada Tahun 2025 sebagian besar disebabkan oleh:

- i) Kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan pembatasan pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh signifikan terhadap akun Belanja Perjalanan Dalam Negeri, Belanja Perjalanan Luar Negeri, Belanja Barang Non Operasional, dan Belanja Persediaan.
- ii) Blokir anggaran Belanja Barang yang tidak bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp16.752.578.000,00.

Rincian Pengembalian Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel B.4.2.

Rincian Realisasi Pengembalian Belanja Barang s.d. 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi	Pengembalian Belanja	Realisasi Netto
Belanja Barang Operasional	45.939.200.934	1.846.000	45.937.354.934
Belanja Barang Non Operasional	25.347.416.404	0	25.347.416.404
Belanja Barang Persediaan	2.555.338.168	0	2.555.338.168
Belanja Jasa	243.576.800.563	80.512.930	243.496.287.633
Belanja Pemeliharaan	15.950.597.424	0	15.950.597.424
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	41.034.946.690	29.656.174	41.005.290.516
Belanja Perjalanan Luar Negeri	26.268.400.984	9.292.014	26.259.108.970
Jumlah	400.672.701.167	121.307.118	400.551.394.049

B.5 Belanja Modal

Belanja
Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp111.216.767.152,00 dan Rp91.880.046.583,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 21,05 persen dibandingkan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin signifikan.

Tabel B.5.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024	% Naik/ (Turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.615.975.386	40.612.284.125	66,49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.176.358.852	8.019.241.676	(72,86)
Belanja Modal Lainnya	41.424.432.914	43.248.520.782	(4,22)
Jumlah Belanja Kotor	111.216.767.152	91.880.046.583	21,05
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	111.216.767.152	91.880.046.583	21,05

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp67.615.975.386,00 dan Rp40.612.284.125,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 66,49 persen dibandingkan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel B.5.1.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.615.975.386	40.612.284.125	66,49
Jumlah	67.615.975.386	40.612.284.125	66,49

Peningkatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin antara lain disebabkan pembelian sarana dan prasarana pendukung seperti:

- Pengadaan server dan storage dalam rangka mendukung *Online Single Submission* (OSS);
- Pengadaan Lift untuk Gedung Suhartoyo Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM; dan
- Pengadaan Furniture untuk ruang pimpinan, ruang rapat, ruang kerja, ruang nusantara dan ruang daycare.

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.176.358.852,00 dan Rp8.019.241.676,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 72,86 persen dibandingkan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel B.5.2.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.176.358.852	8.019.241.676	(72,86)
Jumlah	2.176.358.852	8.019.241.676	(72,86)

Penurunan disebabkan karena menurunnya kebutuhan renovasi ruang di Tahun Anggaran 2025, sehingga secara alokasi pagu dan realisasi anggaran juga menurun.

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp41.424.432.914,00 dan Rp43.248.520.782,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 4,22 persen dibandingkan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel B.5.3.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Lainnya	41.424.432.914	43.248.520.782	(4,22)
Jumlah	41.424.432.914	43.248.520.782	(4,22)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp121.871.588,00 dan Rp104.475.690,00.

Tabel C.1.1
Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	121.871.588	104.475.690
Jumlah	121.871.588	104.475.690

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 seluruhnya berasal dari Satker Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan sudah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 9 Januari 2025 dengan Nomor Transaksi Bank (NTB) 569257054203 dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) FDD442CQ01D32BHM sebesar Rp121.871.588,00.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM disajikan pada **Lampiran 2** Laporan Keuangan ini.

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya
dan Setara
Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp718.886.694,00 dan Rp503.240.777,00.

Tabel C.2.1
Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Kas Lainnya dan Setara Kas	718.886.694	503.240.777
Jumlah	718.886.694	503.240.777

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel C.2.2
Daftar Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Satuan Kerja	31 Des 2025	31 Des 2024
1	Sekretariat Utama	652.750.603	501.845.511
2	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	66.031.743	13.082
3	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	104.348	-
4	DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur	-	1.382.184
	Jumlah	718.886.694	503.240.777

Rincian penjelasan saldo Kas Lainnya dan Setara kas per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp652.750.603,00 pada Satker Sekretariat Utama berupa:
 - i) Saldo yang berasal dari pencairan Honorarium Tetap Bulan Desember 2025 yang belum diserahkan kepada pegawai dan masih berada di rekening Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan sebesar Rp578.905.726,00. Atas saldo dimaksud, selanjutnya telah ditransfer ke rekening pegawai pada bulan Januari 2026 sebesar Rp546.426.012,00 dan selisih lebih atas perhitungan ketidakhadiran pegawai dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp32.479.714,00 dengan NTB 138915342584 dan NTPN 347188N3F5TSEV9N;
 - ii) Saldo Dana Operasional Menteri dan Wakil Menteri yang masih di berada di Bendahara Pengeluaran Pembantu sampai dengan tanggal pelaporan sebesar Rp73.844.877,00. Atas saldo dimaksud telah disetorkan ke Kas Negara seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:
 - Penyetoran Saldo Dana Operasional Menteri sebesar Rp73.756.971,00 dengan NTB 698043120233 dan NTPN AEA2F8N3F5TPS2VL;
 - Penyetoran Saldo Dana Operasional Wakil Menteri sebesar Rp87.906,00 dengan NTB 377954120000 dan NTPN 52B197QLVBBD41M.

2. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp66.031.743,00 pada Satker Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal seluruhnya berasal dari saldo pada rekening kantor *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC) dengan rincian sebagai berikut:
 - i) Saldo pada rekening kantor IIPC Seoul sebesar Rp14.877,00 berasal dari bunga bank/jasa giro yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2025.
 - ii) Saldo pada rekening kantor IIPC Tokyo sebesar Rp47.663,00 berasal dari bunga bank/jasa giro yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2025.
 - iii) Saldo pada rekening IIPC New York sebesar Rp65.969.203,00 berasal dari biaya asuransi kesehatan Tenaga Perbantuan Administrasi (TPA) yang belum diserahkan sampai dengan 31 Desember 2025.
3. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp104.348,00 pada Satker Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal seluruhnya berasal dari Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2025. Atas saldo tersebut telah dilakukan penyetoran pajak pada tanggal 9 Januari 2026 dengan NTB 260108041332 dan NTPN C8B122MECR5HNNHVR.

Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM disajikan pada **Lampiran 3** Laporan Keuangan ini.

C.3 Belanja Dibayar Di muka (*Prepaid*)

Belanja
Dibayar
Dimuka

Saldo Belanja Dibayar Di muka (*Prepaid*) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.283.609.537,00 dan Rp26.479.577.654,00.

Tabel C.3.1
Belanja dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Belanja Dibayar Di muka (Prepaid)	10.283.609.537	26.479.577.654
Jumlah	10.283.609.537	26.479.577.654

Belanja Dibayar Di muka (*Prepaid*) merupakan pengeluaran Satuan Kerja/Pemerintah yang telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran. namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum

diterima/dinikmati Satuan Kerja/Pemerintah. Saldo Belanja Dibayar Di muka (*Prepaid*) Per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

Tabel C.3.2
Rincian Belanja Dibayar Dimuka Menurut Satuan Kerja
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai	
	31 Des 2025	31 Des 2024
Satker Sekretariat Utama	106.355.578	235.219.791
1. Potongan Presensi Pegawai Bulan Desember	93.834.434	31.327.286
2. Lisensi <i>Zoom</i>	9.746.878	8.796.162
3. Lisensi <i>Canva</i>	0	1.865.110
4. Langganan (<i>membership</i>) Hukum Online	0	193.231.233
5. Langganan <i>Campsite</i>	2.774.266	0
Satker Deputi Bidang Teknologi Informasi PM	9.520.103.281	19.959.575.063
1. Lisensi <i>Annual Technical Support (ATS)</i>	2.988.325.721	1.344.297.027
2. Lisensi <i>Business Intelligence</i>	1.599.850.757	1.509.622.813
3. Lisensi <i>Office 365</i>	360.924.065	460.494.506
4. Lisensi <i>Software Microservices</i>	2.134.786.823	2.210.747.253
5. Lisensi <i>Aplication Monitoring System</i>	1.575.943.027	1.803.743.901
6. Lisensi <i>Threat Intelligence and Darkweb Monitoring Cyble</i>	860.272.888	10.849.305.560
7. Lisensi <i>Endpoint Security</i>	0	1.398.749.725
8. Lisensi <i>Vulnerability Assessment Tool</i>	0	172.211.538
9. Lisensi <i>Security Testing Tool</i>	0	210.402.740
Satker Deputi Bidang Promosi PM	634.401.400	6.273.075.833
1. Lisensi <i>Zoom</i>	13.627.562	13.098.343
2. Lisensi Aplikasi pada Kantor IIPC	42.748.265	21.684.976
3. Biaya Bantuan Pendidikan Anak (BBPA) pada IIPC Abu Dhabi	84.338.301	274.925.499
4. Biaya Bantuan Pendidikan Anak (BBPA) pada IIPC Seoul	163.732.973	0
5. Biaya Bantuan Pendidikan Anak (BBPA) pada IIPC Singapura	21.009.739	0
6. Biaya Sewa <i>venue World Economic Forum (WEF)</i> - Davos	0	5.963.367.015
7. Biaya Sewa Peralatan pada Kantor IIPC	41.299.228	0
10. Langganan IIPC	267.645.332	0
Satker Deputi Bidang Pelayanan PM	22.749.278	11.706.967
1. Lisensi <i>Zoom</i>	22.749.278	11.706.967
Jumlah	10.283.609.537	26.479.577.654

C.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang
Bukan
Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp40.090.961,00 dan Rp7.090.354,00.

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Tabel C.4.1
Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Piutang Bukan Pajak	40.090.961	7.090.354
Jumlah	40.090.961	7.090.354

Perbandingan rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel C.4.2
Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
1	Parihutan Martin Yosep S.E.	-	1.106.444
2	Sopyan	-	1.263.860
3	Usamah Widiatmoko	-	2.118.550
4	Ilyasa	392.370	-
5	Pungky Arifiandoko	-	1.301.500
6	Husen Maulana	-	1.300.000
7	Willi Brodus	562.020	-
8	Endang Setia Budi	4.609.919	-
9	Purwanti	3.412.500	-
10	Dana Dwiputra	2.636.700	-
11	Raden Robby Azhari	1.070.000	-
12	Irdawati	4.550.000	-
13	Rossi Abi Al Irsyad	4.550.000	-
14	Melanton Hendra Siregar	3.174.600	-
15	Ekania Widyasari	2.797.600	-
16	Cecilia Christine Pasaribu	2.886.200	-
17	Vanny Meitasari	4.062.900	-
18	Ira Hapsari	3.174.600	-
19	Sucipto	2.211.552	-
	Jumlah	40.090.961	7.090.354

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 seluruhnya merupakan piutang lancar yang berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa kelebihan pembayaran belanja pegawai.

C.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih –
Piutang
Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp(200.455,00) dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah penyisihan yang dilakukan terhadap Piutang agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Tabel C.5.1
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	(200.455)	0
Jumlah	(200.455)	0

Kualitas Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 seluruhnya merupakan piutang lancar, sehingga dilakukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar 5 permil dari nilai piutang.

C.6 Persediaan

Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp976.407.435,00 dan Rp1.262.051.465,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tabel C.6.1
Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Persediaan	976.407.435	1.262.051.465
Jumlah	976.407.435	1.262.051.465

Nilai Persediaan 31 Desember 2025 dan 2024 seluruhnya merupakan Barang Konsumsi dengan rincian mutasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	1.262.051.465
Mutasi tambah:	2.555.338.168
Pembelian	2.555.338.168
Mutasi kurang:	2.840.982.198
Pemakaian Persediaan Konsumsi	2.838.299.158
Pemakaian Bahan untuk Pemeliharaan	2.683.040
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	976.407.435

Mutasi Tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp2.555.338.168,00 seluruhnya berasal dari transaksi Pembelian persediaan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembelian Persediaan Barang Konsumsi (521811) sebesar Rp2.057.975.362,00 berupa pembelian alat tulis kantor dan alat listrik lainnya
- 2) Pembelian Barang Persediaan Lainnya (521832) sebesar Rp497.362.806,00 berupa obat-obatan dan bahan penunjang laboratorium.

Mutasi Kurang:

Mutasi kurang sebesar Rp2.840.982.198,00 seluruhnya berasal dari:

- 1) Pemakaian Barang konsumsi berupa alat tulis kantor, alat listrik lainnya, dan Obat-obatan sebesar Rp2.838.299.158,00
- 2) Pemakaian bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp2.683.040,00.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 senilai Rp976.407.435,00 seluruhnya berada dalam kondisi baik.

Pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 terdapat pencatatan persediaan usang sebesar Rp424.532.381,00, di mana atas persediaan usang sebagaimana dimaksud telah diterbitkan keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 125 Tahun 2025 Tanggal 4 Juni 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) selain Tanah dan atau/atau Bangunan Pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berupa 22.274 (dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) Unit Persediaan Habis Pakai dalam Kondisi Usang, sehingga tidak lagi disajikan sebagai persediaan usang dalam laporan barang persediaan per 31 Desember 2025.

Rincian persediaan per 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran 4** Laporan Keuangan ini.

C.7 Tanah

Tanah Tanah yang dimiliki Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sama sebesar Rp1.959.546.919.000,00.

Tabel C.7.1
Tanah Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Tanah	1.959.546.919.000	1.959.546.919.000
Jumlah	1.959.546.919.000	1.959.546.919.000

Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Luas Tanah	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	398 m ²	2.717.574.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	18.496 m ²	1.944.165.424.000
3	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	9.202 m ²	12.663.921.000
Total		28.096 m ²	1.959.546.919.000

Sertipikat Tanah dan bangunan sebagai bukti kepemilikan atas aset tanah seluruhnya dikuasai oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Pelaksanaan sertifikasi Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan yang pada tahun 2024 masih berstatus Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) telah selesai dilaksanakan dan telah diubah statusnya menjadi Sertipikat Hak Pakai dengan nomor NIB. 10.13.000039871.0 pada tanggal 15 Januari 2026.

Selain itu pada Laporan Keuangan Tahun 2024 masih terdapat sebagian aset tanah negara dan gedung bangunan rumah negara Golongan II, yang berlokasi di Jalan Bima Raya Nomor 120 Depok sesuai Sertipikat Nomor 150, masih digunakan oleh pensiunan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM a.n. Bapak Said Ridwan. Selanjutnya pada Bulan Februari Tahun 2025, telah diterima pengembalian kunci rumah dinas sehingga penguasaan atas aset tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud telah kembali pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

C.8 Peralatan dan Mesin

Peralatan
dan Mesin

Nilai aset tetap berupa peralatan dan mesin Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp427.839.805.746,00 dan Rp380.253.431.212,00.

Tabel C.8.1
Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Peralatan dan Mesin	427.839.805.746	380.253.431.212
Jumlah	427.839.805.746	380.253.431.212

Terdapat mutasi nilai peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	380.253.431.212
Mutasi tambah:	73.553.697.456
1. Pembelian aset peralatan dan mesin	67.349.575.386
2. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan dari operasi	6.155.282.070
3. Reklasifikasi masuk dari gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin	48.840.000
4. Pengadaan aset peralatan dan mesin dari belanja barang	14.649.780
Mutasi kurang:	25.981.972.702
1. Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	3.274.500.000
2. Penghentian aset dari penggunaan	22.707.472.702
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	427.839.805.746
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	321.737.860.536
Nilai Buku per 31 Desember 2025	106.101.945.210

Mutasi tambah:

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp73.553.697.456,00 berasal dari satker Sekretariat Utama dan satker Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal yang terdiri dari:

1. Pembelian peralatan dan mesin menggunakan akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) sebesar Rp67.349.575.386,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Satker/Pengadaan	Jumlah (Rp)
	Satker Sekretariat Utama	25.487.705.609
1	Pengadaan Furniture ruang pimpinan, ruang rapat, ruang kerja, ruang nusantara dan ruang daycare (Sofa, meja, kursi, lampu, frame)	10.253.331.798
2	Pengadaan Akses Door dan Akses Face	512.675.700
3	Pengadaan Alat pengolah Data (Laptop, Printer, Smartboard)	5.027.173.350
4	Pengadaan Video Wall, TV, dan CCTV	1.136.381.180
5	Pengadaan Chiller	4.459.579.581
6	Pengadaan Perlengkapan Fitness	626.040.000
7	Pengadaan Peralatan Kehumasan	198.024.000
8	Pengadaan Lift (Termin I)	3.274.500.000
	Satker Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	41.861.869.777
1	Pengadaan perangkat Server	14.895.319.998
2	Pengadaan perangkat Storage	20.462.393.779
3	Distribution Swicth	3.984.456.000
4	Wireless Access Point	2.086.800.000
5	Wireless Controller (WLC)	432.900.000
	TOTAL	67.349.575.386

Terdapat selisih antara realisasi belanja modal peralatan dan mesin berbasis kas dengan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp266.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Basis Kas	Rp67.615.975.386,00
2. Perolehan Peralatan dan Mesin - BMN	Rp67.349.575.386,00
Selisih pencatatan	Rp266.400.000.00

Selisih dimaksud berasal dari pembayaran Termin 2 atas pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Suhartoyo menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang belum selesai dilaksanakan hingga 31 Desember 2025 dan diberikan kesempatan perpanjangan penyelesaian pekerjaan hingga tanggal 19 Februari 2026. Sehingga atas pembayaran yang sudah membebani belanja modal dimaksud belum dapat dicatat sebagai aset peralatan dan mesin sampai dengan tanggal pelaporan.

2. Pengaktifan/penggunaan kembali kendaraan dinas operasional sebagai aset peralatan dan mesin yang sebelumnya dicatat dalam pos aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan sebesar Rp6.155.282.070,00. Pengaktifan kembali dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 01/BAPF/KENDARAAN DINAS/2025 tanggal 22 April 2025 dan Surat Keterangan Penggunaan Kembali BMN pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 01/SKPK-BMN/KENDARAAN/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025, dengan rincian sebagai berikut:
 - i) 14 (empat belas) unit Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) dengan total nilai sebesar Rp2.286.456.070,00; dan
 - ii) 9 (sembilan) unit Sedan dengan total nilai sebesar Rp3.868.826.000,00.
3. Reklasifikasi masuk dari aset gedung dan bangunan ke aset peralatan dan mesin berupa 12 (dua belas) unit AC Split senilai Rp48.840.000,00 perolehan tahun 2024. Koreksi pencatatan dilaksanakan berdasarkan hasil revidi Inspektorat Nomor LAP-042/INS/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025.
4. Pengadaan Karpet Lantai senilai Rp14.649.780,00 pada pekerjaan Perbaikan Ruang Direktur Kerjasama Bilateral sesuai SPK Nomor 01/SPK/BU-I/RUANG.DIREKTUR-KERJASAMA.BILATERAL-YPM/I/2025 yang semula dibebankan pada akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan kemudian dikapitalisasi menjadi aset Peralatan dan Mesin.

Mutasi Kurang:

1. Mutasi kurang sebesar Rp3.274.500.000,00 seluruhnya berupa reklasifikasi pencatatan peralatan dan mesin kedalam aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) atas pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Suhartoyo berdasarkan perjanjian kerja Nomor EP-01K4VZAPPJYKCB8Y1XZ0WQHA7 tanggal 16 September 2025 dan addendum perjanjian kerja Nomor EP-01K4VZAPPJYKCB8Y1XZ0WQHA7-ADD tanggal 16 Desember 2025, yang belum selesai dilaksanakan hingga 31 Desember 2025.
2. Mutasi kurang aset Peralatan dan Mesin berupa penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp22.707.472.702,00 seluruhnya berasal dari satker Sekretariat Utama dengan rincian sebagai berikut:
 - i) Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN Nomor 20/KETERANGAN/A.3/B.5/2025 tanggal 19 Mei 2025 senilai Rp22.442.910.152,00 berupa Server, Firewall, Router, Switch, dan Peralatan Jaringan Lainnya.
 - ii) Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN Nomor

59/KETERANGAN/A.3/B.5/2025 tanggal 13 November 2025 senilai Rp264.562.550,00 berupa CCTV, Mesin Cuci, Mesin Fotocopy, Heater, dan Notebook.

Rincian penghentian aset dari penggunaan tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran 5** sementara Rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan Akumulasi penyusutannya disajikan pada **Lampiran 6** Laporan Keuangan ini.

Dalam neraca per 31 Desember 2025, terdapat Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat yang masih tercatat sebagai aset Peralatan dan Mesin dan belum dipindahkan ke Aset Lain-Lain pada satuan kerja Sekretariat Utama dengan rincian sebagai berikut:

- i) 229 (dua ratus dua puluh sembilan) unit mesin peralatan khusus Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) senilai Rp25.392.547.692,00;
- ii) 6 (enam) unit mesin peralatan Non TIK yang terdiri dari 1 (satu) unit antenne UHF stationary senilai Rp53.245.352,00, 1 (satu) unit *chiller* senilai Rp1.401.295.899,00, dan 4 (empat) unit elevator/lift senilai Rp3.623.270.000,00.

Atas barang rusak berat sebagaimana dimaksud, akan diterbitkan surat keputusan penghentian penggunaannya di Tahun 2026 sebagai dasar pencatatan ke pos Aset Lain-Lain dan selanjutnya dilakukan proses penghapusan. Rincian barang rusak berat disajikan dalam **Lampiran 7** Laporan Keuangan ini.

C.9 Gedung dan Bangunan

Gedung
dan
Bangunan

Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp298.666.132.596,00 dan Rp294.993.064.951,00.

Tabel C.9.1
Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2025	31 DES 2024
Gedung dan Bangunan	298.666.132.596	294.993.064.951
Jumlah	298.666.132.596	294.993.064.951

Terdapat mutasi nilai gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	294.993.064.951
Mutasi tambah:	3.721.907.645

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Renovasi aset gedung dan bangunan	2.176.358.852
2. Penambahan nilai aset gedung dan bangunan dari belanja barang	1.545.548.793
Mutasi kurang:	48.840.000
Reklasifikasi ke aset peralatan dan mesin	48.840.000
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	298.666.132.596
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	108.321.855.088
Nilai Buku per 31 Desember 2025	190.344.277.508

Mutasi tambah:

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.721.907.645,00,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama terdiri atas:

1. Pelaksanaan renovasi atas gedung dan bangunan menggunakan akun 533121 (Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan) sebesar Rp2.176.358.852,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Nilai (Rp)
1	Renovasi Ruang Meeting Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM TA 2025	197.962.395
2	Renovasi Ruang Staf TU Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM TA 2025	197.795.895
3	Renovasi Ruang Holding Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM	193.823.483
4	Renovasi Toilet Ruang Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM	198.011.790
5	Renovasi Ruang Kerja Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM	198.048.198
6	Renovasi Ruang Holding Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM	198.638.940
7	Renovasi Ruang TU dan Staf Menteri Lt 2	198.087.825
8	Renovasi Prayer Room dan Walk in Closet Lt. 2 Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM	198.521.613
9	Renovasi Ruang Conference Menteri Investasi dan Hilirisasi /Kepala BKPM Tahun Anggaran 2025	397.797.138
10	Renovasi Ruang Meeting Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM	197.671.575
	Jumlah	2.176.358.852

2. Penambahan nilai aset gedung dan bangunan yang berasal pekerjaan penggantian lantai marmer sebesar Rp1.545.548.793,00, semula dibebankan

pada belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kemudian dikapitalisasi menjadi aset gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Nilai (Rp)
1	Perbaikan Lantai Lobby Lift Lt.2 Gedung Barli Halim	198.511.845
2	Perbaikan Lantai Selasar Depan Ruang Menteri	198.650.595
3	Perbaikan Lantai Selasar Ruang Indonesia Maju	198.567.900
4	Perbaikan Lantai Tangga Lobby Gedung Lantai 1 Barli Halim	198.528.828
5	Perbaikan Lantai Lobby Ruang Indonesia Maju	198.440.250
6	Perbaikan Lantai Ruang Meeting Menteri	198.656.145
7	Perbaikan Lantai Ruang Lounge Room Menteri	198.610.080
8	Perbaikan Lantai Koridor Hall Ruang Bandung	155.583.150
	Jumlah	1.545.548.793

Mutasi kurang:

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp48.840.000,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa reklasifikasi keluar ke aset peralatan dan mesin atas 12 (dua belas) unit AC Split perolehan tahun 2024 yang semula dicatat sebagai aset Gedung dan Bangunan. Reklasifikasi dimaksud dilaksanakan berdasarkan koreksi pencatatan sesuai hasil reuiu Inspektorat Nomor LAP-042/INS/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025.

Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada **Lampiran 6** Laporan Keuangan ini.

C.10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sama masing-masing sebesar Rp9.022.115.183,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang pada aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama periode yang berakhir 31 Desember 2025.

Tabel C.10.1
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.022.115.183	9.022.115.183
Jumlah	9.022.115.183	9.022.115.183

Jalan,
Irigasi,
dan
Jaringan

Rincian nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	QTY	Nilai (Rp)
1	Jalan	6.211m ²	1.908.177.000
2	Irigasi	12 Unit	2.250.774.000
3	Jaringan	7 Unit	4.863.164.183
Total			9.022.115.183

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada **Lampiran 6** Laporan Keuangan ini.

C.11 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.660.612.849,00 dan Rp1.510.762.849,00.

Tabel C.11.1
Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Aset Tetap Lainnya	1.660.612.849	1.510.762.849
Jumlah	1.660.612.849	1.510.762.849

Terdapat mutasi Aset Tetap Lainnya pada sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	1.510.762.849
Mutasi tambah:	149.850.000
Pembelian	149.850.000
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	1.660.612.849
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	726.647.925
Nilai Buku per 31 Desember 2025	933.964.924

Mutasi tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp149.850.000,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa Pembelian 3 (tiga) buah Lukisan untuk Lobby Ruang Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Ruang TU Menteri Investasi/Kepala BKPM, masing-masing sebesar Rp49.950.000,00, menggunakan akun belanja modal lainnya (536111).

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada **Lampiran 6** Laporan Keuangan ini.

C.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

Tabel C.12.1
Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.274.500.000	-
Jumlah	3.274.500.000	-

Nilai KDP per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.274.500.000,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa pencatatan atas pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Suhartoyo berdasarkan perjanjian kerja Nomor EP-01K4VZAPPJYKCB8Y1XZ0WQHA7 tanggal 16 September 2025 dan adendum terakhir nomoe EP-01K4VZAPPJZYKCB8Y1XZ0WQHA7-ADD-2 tanggal 30 Desember 2025, yang belum selesai dilaksanakan hingga 31 Desember 2025.

C.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset
Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(435.835.462.445,00) dan Rp(407.191.399.711,00).

Tabel C.13.1
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2025	31 DES 2024
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(435.835.462.445)	(407.191.399.711)
Jumlah	(435.835.462.445)	(407.191.399.711)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.959.546.919.000	-	1.959.546.919.000
Peralatan dan Mesin	427.839.805.746	(321.737.860.536)	106.101.945.210
Gedung dan Bangunan	298.666.132.596	(108.321.855.088)	190.344.277.508
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.022.115.183	(5.049.098.896)	3.973.016.287
Aset Tetap Lainnya	1.660.612.849	(726.647.925)	933.964.924
Jumlah	2.696.735.585.374	(435.835.462.445)	2.260.900.122.929

Selanjutnya mutasi akumulasi penyusutan aset tetap pada tahun anggaran 2025 disajikan sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Beban Penyusutan	Koreksi	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	310.059.459.543	28.221.465.062	(16.543.064.069)	321.737.860.536
Gedung dan Bangunan	91.641.971.952	16.070.454.251	609.428.885	108.321.855.088
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.848.704.041	200.394.855	0	5.049.098.896
Aset Tetap Lainnya	641.264.175	85.383.750	0	726.647.925
Jumlah	407.191.399.711	44.577.697.918	15.933.635.184	435.835.462.445

Terdapat koreksi nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp15.933.635.184,00 yang seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp(16.543.064.069,00) berasal dari:
 - a) Koreksi kurang sebesar Rp(22.707.472.702,00) berupa penghentian aset dari penggunaan karena rusak berat antara lain berupa server, router, switch, dan notebook.
 - b) Koreksi tambah sebesar Rp4.242.563,00 berupa koreksi pencatatan nilai buku aset Notebook dengan NUP 633 yang dihentikan dari penggunaan karena rusak berat.

- c) Koreksi tambah sebesar Rp6.155.282.070,00 berupa pengaktifan kembali penggunaan 23 (dua puluh tiga) unit kendaraan operasional roda 4 yang sebelumnya dikelompokkan ke dalam aset yang sudah tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintah.
 - d) Koreksi tambah sebesar Rp4.884.000,00 berasal dari reklasifikasi masuk ke peralatan dan mesin berupa 12 (dua belas) unit AC yang semula dicatat dalam aset gedung dan bangunan.
2. Koreksi nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp609.428.885,00 berasal dari Satker Sekretariat Utama merupakan:
- a) Koreksi kurang akibat reklasifikasi aset ke peralatan dan mesin berupa 12 (dua belas) unit AC perolehan tahun 2024 yang semula dicatat dalam aset gedung dan bangunan sebesar Rp(9.489.881,00).
 - b) Koreksi tambah akibat reklasifikasi biaya penggantian lantai marmer yang semula dibebankan pada akun belanja pemeliharaan kemudian dikapitalisasi menjadi Gedung dan Bangunan sebesar Rp618.918.766,00.

C.14 Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp189.371.924.224,00 dan Rp145.278.190.394,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel C.14.1
Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Software	188.152.034.224	143.938.771.820
Lisensi	1.219.890.000	1.339.418.574
Jumlah	189.371.924.224	145.278.190.394

Terdapat mutasi nilai aset tak berwujud pada periode tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	145.278.190.394
Mutasi tambah:	44.213.262.404
1. Pembelian aset tak berwujud	41.274.582.914

Uraian	Jumlah (Rp)
2. Penambahan nilai aset tak berwujud dari belanja barang	2.938.679.490
Mutasi kurang:	119.528.574
Reklasifikasi keluar ke aset tak berwujud yang tidak digunakan	119.528.574
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	189.371.924.224
Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	179.089.965.030
Nilai Buku per 31 Desember 2025	10.281.959.194

Mutasi tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp44.213.262.404,00 berasal dari:

- i) Pembelian menggunakan akun Belanja Modal Lainnya (536111) sebesar Rp41.274.582.914,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Satker/Pengadaan	Jumlah (Rp)
	Satker Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	5.313.050.000
1	Pembuatan Artificial Intelligence (AI) Sistem Customer Relationship Management (CRM) Digital TA 2025	5.313.050.000
	Satker Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	35.961.532.914
1	Pemeliharaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) TA. 2025	30.472.066.764
2	Pengembangan Exective Information Dashboard untuk Peningkatan Layanan Data bagi Pimpinan di Kementerian Investasi & Hilirisasi/BKPM TA.2025	1.197.024.000
3	Pengembangan Aplikasi Investment Learning Center (ILC) TA.2025	757.686.000
4	Pengembangan Sistem Kepegawaian Terintegrasi dengan Aplikasi Perkantoran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM TA.2025	2.234.163.600
5	Pengembangan Portal Satu Data Kementerian Investasi & Hilirisasi/BKPM TA.2025	676.311.900
	Pengembangan Aplikasi Potensi Investasi Regional (PIR) TA. 2025	624.280.650
	TOTAL	41.274.582.914

- ii) Penambahan nilai aset tak berwujud sebesar Rp2.938.679.490 pada satker Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal berupa pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) berdasarkan SPK Nomor 02/SP/PPK-DTIPM/PENGAWAS/IX/2025 dan telah dilakukan Addendum Kontrak Nomor 01/ADD/PPK-DTIPM/PENGAWAS/2025 tanggal 3 Oktober 2025, yang semula dibebankan pada akun belanja Jasa Konsultan kemudian dikapitalisasi menjadi Aset Tak Berwujud dan menambah nilai aset software.

Mutasi kurang:

Mutasi kurang sebesar Rp119.528.574,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa reklasifikasi keluar 3 (tiga) unit Lisensi SSL certificate ke aset tak berwujud yang tidak digunakan, dengan rincian sebagai berikut:

NUP	Merk	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	SSL Certificate bkpm.go.id	41.317.523	Rusak berat/habis masa manfaatnya
2	SSL Certificate oss.go.id	39.226.978	
3	SSL Certificate investindonesia.go.id	38.984.073	
	Total	119.528.574	

Daftar rincian Aset Tak Berwujud disajikan dalam **Lampiran 8** Laporan Keuangan ini.

Dalam neraca per 31 Desember 2025, terdapat software yang tidak dimanfaatkan dan belum diusulkan penghentian penggunaannya pada satker Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

- i) Sistem Web Based Monitoring dengan NUP 1 senilai Rp392.365.600;
- ii) Sistem Manajemen Audit dengan NUP 18 senilai Rp196.058.500; dan
- iii) Aplikasi Business Intelligent (BI) dengan NUP 22 senilai Rp15.905.203.280,00.

Atas software sebagaimana dimaksud, akan diterbitkan surat keputusan penghentian penggunaannya di Tahun 2026 sebagai dasar pencatatan ke pos Aset Lain-Lain dan selanjutnya dilakukan proses penghapusan.

C.15 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp61.043.465.915,00 dan Rp78.629.147.521,00.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (DYDP) merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran). namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Tabel C.15.1
Dana yang Dibatasi Penggunaannya Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Dana yang Dibatasi Penggunaannya (DYDP)	61.043.465.915	78.629.147.521
Jumlah	61.043.465.915	78.629.147.521

Dana
Yang
Dibatasi
Pengguna
annya

Adapun Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Tahun 2025 merupakan dana pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) atas Kontrak pekerjaan dengan tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) s.d 31 Desember 2025 maupun yang diberikan kesempatan melewati tahun anggaran dan sudah membebani anggaran namun belum dibayarkan kepada penyedia yang berhak. Informasi transaksi realisasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya di Rekening Penampungan adalah sebagai berikut.

- a. Mutasi saldo Dana di Rekening Penampungan per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:
 - 1) Saldo Awal Dana Rekening Penampungan Tahun 2025 terdiri dari 42 (empat puluh dua) paket pekerjaan sebagaimana tercantum pada SPM Penampungan 2025 sebesar Rp62.386.245.915,00;
 - 2) Nilai pembayaran atas 2 (dua) paket pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana tercantum pada SP2D-Pembayaran 2025 sebesar Rp1.342.780.000,00; dan
 - 3) Saldo Dana Rekening Penampungan Tahun 2025 atas 40 (empat puluh) paket pekerjaan yang belum dibayarkan ke Pihak Terkait sebesar Rp61.043.465.915,00.
- b. Sampai dengan 31 Desember 2025, 39 (tiga puluh sembilan) paket pekerjaan telah terdapat perkembangan penyelesaian pekerjaan, namun belum dilakukan pembayaran ke rekening Penyedia sebesar Rp60.741.082.674,00. Nilai tersebut telah dicatat sebagai beban/aset serta telah disajikan sebagai nilai utang kepada pihak ketiga lainnya.
- c. Terdapat 1 (satu) paket pekerjaan yang diberikan kesempatan melewati tahun anggaran yaitu Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Suhartoyo berdasarkan Kontrak Nomor EP-01K4VZAPPJZYKCB8Y1XZ0WQHA7 tanggal 16 September 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.540.900.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 107 hari kalender sejak tanggal 16 September 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Pekerjaan tersebut telah dilakukan dua kali adendum dengan adendum terakhir EP-01K4VZAPPJZYKCB8Y1XZ0WQHA7-ADD-2 tanggal 30 Desember 2025 mengatur mengenai pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan melewati batas akhir tahun anggaran selama 50 hari sejak tanggal berakhirnya kontrak sampai dengan tanggal 19 Februari 2026. Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Suhartoyo yang telah dilakukan serah terima sesuai BAST Nomor 02/BAST/LIFT-T2/BU-II/II/2026 tanggal 19 Februari 2026.

d. Mutasi Saldo Dana Penampungan Tahun 2025 pada per 31 Maret 2026 sebagai berikut.

- 1) Nilai pembayaran atas 40 (empat puluh) paket pekerjaan Tahun 2025 yang telah diselesaikan sebagaimana tercantum pada SP2D Pembayaran-2026 sebesar Rp61.007.482.674,00;
- 2) Saldo Dana RPATA yang dikembalikan ke RKUN atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sebagaimana tercantum pada SP2D-Penihilan sebesar Rp35.983.241,00. Penihilan dilakukan pada bulan Januari 2026;
- 3) Saldo akhir Dana di Rekening Penampungan Tahun Anggaran 2025 per 31 Maret 2026 sebesar Rp0,00.

Rincian dana yang dibatasi penggunaannya dan rincian realisasi mutasi saldo atas DYDP per 31 Desember 2025 disajikan dalam **Lampiran 9** Laporan Keuangan ini.

C.16 Aset Lain - Lain

Aset Lain
Lain

Saldo Aset Lain-lain Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.707.945.738,00 dan Rp24.264.826.079,00.

Tabel C.16.1
Aset Lain-lain Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Aset Lain-lain	7.011.983.188	6.493.763.715
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	695.962.550	17.098.177.364
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi	-	672.885.000
Jumlah	7.707.945.738	24.264.826.079

Terdapat mutasi nilai Aset Lain-Lain pada Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1) Aset Lain-lain

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp7.011.983.188,00 dan Rp6.493.763.715,00. Saldo tersebut seluruhnya berasal dari Satker Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal berupa deposit sewa kantor perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Luar Negeri, *Indonesia Investment Promotion Center (IIPC)*.

Deposit masih berada pada pemilik Gedung dan akan dikembalikan ke Kas Negara pada saat perjanjian sewa berakhir dan/tidak diperpanjang akibat kantor perwakilan mengalami perpindahan atau penutupan. Terdapat mutasi deposit sewa kantor pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	6.493.763.715
Mutasi tambah:	518.219.473
Penyesuaian perhitungan Kurs tengah BI per 31 Des 2025	518.219.473
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	7.011.983.188

Mutasi tambah seluruhnya berasal dari penyesuaian perhitungan nilai deposit kantor dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.16.2
Deposit Sewa Kantor IIPC Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No	Pemilik Gedung (Lessor)	Kantor IIPC (Lessee)	Nilai Deposit	Kurs Tengah BI 31 Des 25	Jumlah per 31 Des 2025
1	Fukoku Mutual Seimei Insurance Company	Tokyo - Jepang	JPY 15.460.170	107,59	1.663.372.058
2	Suntec Real Estate Investment Trust	Singapura - Singapura	SGD 43.020	13.068,57	562.209.881
3	Servcorp Administration Services Ltd	Abu Dhabi - UEA	AED 94.840	4.569,52	433.373.277
4	Sherwood 370 Lexington LLC (d/h)	New York - USA	USD 26.693	16.782,00	447.965.786
5	Landmark Space Limited - Bishop Gate	London - Inggris	GBP 28.400	22.665,78	643.708.152
6	Perpetual Trustee Company Limited	Sydney - Australia	AUD 198.706	11.254,86	2.236.408.211
7	SIFC Tower One Development YH	Seoul - Korea Selatan	KRW 88.281.294	11,61	1.024.945.823
TOTAL					7.011.983.188

2) **Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi**

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp695.962.550.00 dan Rp17.098.177.364,00 dan Terdapat mutasi Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah selama periode Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	17.098.177.364
Mutasi tambah:	22.707.472.702
Reklasifikasi masuk dari peralatan dan mesin ke aset rusak berat	22.707.472.702
Mutasi kurang:	39.109.687.516

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penggunaan kembali aset kendaraan dinas	6.155.282.070
2. Penghapusan aset	20.498.487.786
3. Persetujuan penjualan BMN	12.455.917.660
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	695.962.550

Mutasi tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp22.707.472.702,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa penghentian aset karena rusak berat berdasarkan:

1. Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN Nomor 20/KETERANGAN/A.3/B.5/2025 tanggal 19 Mei 2025 senilai Rp22.442.910.152,00 berupa Server, Firewall, Router, Switch, dan Peralatan Jaringan Lainnya.
2. Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN Nomor 59/KETERANGAN/A.3/B.5/2025 tanggal 13 November 2025 senilai Rp264.562.550,00 berupa CCTV, Mesin Cuci, Mesin Fotocopy, Heater, dan Notebook.

Mutasi Kurang:

Mutasi kurang sebesar Rp39.109.687.516,00 berasal dari:

1. Pengaktifan/penggunaan kembali kendaraan dinas operasional kedalam aset peralatan dan mesin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 01/BAPF/KENDARAAN DINAS/2025 tanggal 22 April 2025 dan Surat Keterangan Penggunaan Kembali BMN pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 01/SKPK-BMN/KENDARAAN/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025. dengan rincian sebagai berikut:
 - i) 14 (empat belas) unit Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) dengan total nilai sebesar Rp2.286.456.070.00; dan
 - ii) 9 (sembilan) unit Sedan dengan total nilai sebesar Rp3.868.826.000.00.
2. Penghapusan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi sebesar Rp20.498.487.786,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - i) Penghapusan server, switch, notebook, camera vidio sebesar Rp913.973.202,00 berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 245 Tahun 2025
 - ii) Penghapusan server sebesar Rp6.194.197.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 247 Tahun 2025

- iii) Penghapusan firewall dan peralatan jaringan lainnya sebesar Rp5.352.310.144,00 berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 279 Tahun 2025
 - iv) Penghapusan alat pembersih, TV, dan Audio Visual sebesar Rp8.038.007.440,00 berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 295 Tahun 2025
3. Permohonan penjualan BMN sebesar Rp12.455.917.660,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama yang berasal dari Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi dan diusulkan kepada pengelola barang untuk dilelangkan berdasarkan:
- i) Surat permohonan penjualan BMN nomor 526/A.3/B.3/2025 tanggal 23 Juli 2025 berupa server senilai Rp4.361.061.075,00
 - ii) Surat permohonan penjualan BMN nomor 529/A.3/B.3/2025 tanggal 23 Juli 2025 berupa server senilai Rp8.094.856.585,00

Atas kedua permohonan diatas sudah diterbitkan surat persetujuan penjualan dan dilakukan lelang dengan hasil tidak laku terjual dan akan dilakukan lelang ulang. Atas aset yang sudah diusulkan ke Pengelola Barang untuk dijual sudah tidak tercatat dalam daftar aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah, dan disajikan dalam **Lampiran 10** laporan keuangan ini.

3) Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasi

Saldo Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp672.885.000,00. Terdapat mutasi pada periode tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	672,885,000
Mutasi tambah:	119,528,574
Reklasifikasi masuk Lisensi yang telah habis masa manfaat	119,528,574
Mutasi kurang:	792,413,574
Penghapusan	792,413,574
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	-

Mutasi tambah:

Mutasi mutasi tambah sebesar Rp119.528.574,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama merupakan pencatatan reklasifikasi masuk atas aset tak

berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah karena masa manfaatnya sudah habis berupa 3 (tiga) unit Lisensi *SSL Certificate*.

Mutasi kurang:

Mutasi kurang sebesar Rp792.413.574,00 terdiri dari:

1. Mutasi kurang sebesar Rp119.528.574,00 seluruhnya berasal dari penghapusan Lisensi *SSL Certificate* pada Satker Sekretariat Utama berdasarkan Surat Keputusan Nomor 276 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Penghapusan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan berupa 3 (Tiga) Unit Aset Tak Berwujud.
2. Penghapusan aset sebesar Rp672.885.000,00 berasal dari Satker Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal berupa Sistem *Helpdesk Layanan Berusaha* (NUP 12) sebesar Rp290.400.000,00 dan Sistem Penyampaian Data Elektronik (NUP 13) sebesar Rp382.485.000,00 yang sudah tidak digunakan lagi berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan BMN Nomor 124 tahun 2025.

Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan disajikan dalam **Lampiran 11** Laporan Keuangan ini.

C.17 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akm.
Penyusutan
/ Amortisasi
Aset
Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(179.783.806.299,00) dan Rp(124.456.192.669,00).

Tabel C.17.1
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(179.783.806.299)	(124.456.192.669)
Jumlah	(179.783.806.299)	(124.456.192.669)

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Software	188.152.034.224	(178.723.998.030)	9.428.036.194
Lisensi	1.219.890.000	(365.967.000)	853.923.000
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	695.962.550	(693.841.269)	2.121.281
Total	190.067.886.774	(179.783.806.299)	10.284.080.475

Sementara rincian mutasi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Beban Peny/ Amortisasi	Saldo
Akumulasi Amortisasi Software	106.407.359.607	72.316.638.423	178.723.998.030
Akumulasi Amortisasi Lisensi	277.770.698	88.196.302	365.967.000
Akm. Peny. Aset Tetap yang tidak digunakan	17.098.177.364	(16.404.336.095)	693.841.269
Akm. Peny. ATB yang tidak digunakan	672.885.000	(672.885.000)	-
Total	124.456.192.669	55.327.613.630	179.783.806.299

C.18 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang
Kepada
Pihak
Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp62.395.240.982,00 dan Rp77.075.313.679,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Tabel C.18
Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Utang Kepada Pihak Ketiga	62.395.240.982	77.075.313.679
Jumlah	62.395.240.982	77.075.313.679

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga disajikan dalam daftar berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DES 2025	31 DES 2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	269.602.831	68.112.066
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	772.173.688	801.611.987
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	61.353.464.463	76.205.589.626
Total	62.395.240.982	77.075.313.679

Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp62.395.254.408,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp269.602.831,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa kekurangan pembayaran belanja pegawai tahun 2025 yang baru diajukan pembayarannya di tahun 2026.
2. Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp772.173.688,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama antara lain berupa tagihan daya dan jasa pemakaian bulan Desember 2025 yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tagihan dari PT. PLN Persero atas pemakaian listrik periode bulan Desember 2025 untuk gedung diklat Cianjur, gedung kantor, gedung parkir, dan gedung auditorium Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp736.232.213,00.
 - b) Tagihan dari PT Telkom atas pemakaian telepon periode bulan Desember 2025 untuk gedung kantor dan daycare Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp14.812.742,00.
 - c) Tagihan dari PT PAM Jaya atas pemakaian air periode bulan Desember 2025 untuk Gedung kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp20.666.205,00.
 - d) Tagihan dari PT. Indosat atas pemakaian jaringan telekomunikasi periode bulan Desember 2025 untuk unit protokol Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp325.028,00.
 - e) Tagihan dari PT PDAM Cianjur atas pemakaian air periode bulan Desember 2025 untuk gedung diklat cianjur, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp137.500,00.
3. Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp61.353.464.463,00 terdiri dari:
 - a) Honorarium tetap bulan Desember 2025 sebesar Rp546.426.012,00 yang belum diserahkan kepada pegawai yang berhak sampai dengan tanggal pelaporan. Atas Honorarium dimaksud telah diselesaikan kewajiban pembayarannya kepada pegawai pada bulan Januari 2026.
 - b) Asuransi kesehatan Pejabat Promosi Investasi (PPI) dan Pembantu Pejabat Promosi Investasi (PPPI) Bulan Desember 2025 yang belum diserahkan sebesar Rp65.955.777,00.
 - c) Tagihan atas kontrak pekerjaan pihak ketiga dengan tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 23 s.d. 31 Desember 2025 yang dananya masih

tersimpan dalam RPATA namun belum dibayarkan kepada penyedia yang berhak sampai dengan tanggal neraca sebesar Rp60.741.082.674,00.

C.19 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan
Diterima di
Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp780.402.844,00 dan Rp1.076.086.105,00. Pendapatan Diterima Di muka merupakan pendapatan PNPB yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Tabel C.19.1
Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Pendapatan Diterima Di muka	780.402.844	1.076.086.105
Jumlah	780.402.844	1.076.086.105

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 seluruhnya berasal dari Pendapatan Sewa pada Satker Sekretariat Utama berupa Pendapatan Sewa Ruang Kantor/Lahan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah		Keterangan
	31 Des 2025	31 Des 2024	
PT. BRI (Persero). Tbk.	55.876.345	142.484.678	Sewa Ruang Kantor
PT. Bank Mandiri (Persero). Tbk.	149.179.110	372.947.777	Sewa Ruang Kantor
PT. Telkom	161.127.000	322.254.000	Sewa Lahan
Koperasi Karyawan "Pecanderaan"	72.145.717	171.657.050	Sewa Ruang Kantor
PT. Bank Negara Indonesia. Tbk	342.074.672	38.101.000	Sewa Ruang Kantor
Kantor Notaris Mina Ng	-	28.641.600	Sewa Ruang Kantor
Total	780.402.844	1.076.086.105	

C.20 Uang Muka dari KPPN

Uang
Muka dari
KPPN

Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp121.871.588,00 dan Rp104.475.690,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.21 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang
Jangka
Pendek
Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp104.348,00 dan Rp1.382.184.00. Utang Jangka Pendek Lainnya pada tanggal pelaporan seluruhnya berasal dari utang pajak yang belum disetor ke Kas negara oleh Bendahara Pengeluaran pada Satker Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal sebesar Rp104.348,00. Atas Utang Pajak dimaksud seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara di tahun 2026.

C.22 Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.291.357.198.505,00 dan Rp2.311.950.043.091,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan
PNBP

Jumlah Pendapatan pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp766.674.831,00 dan Rp798.282.016,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.1.
Perbandingan Rincian Pendapatan Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024	% naik/ (turun)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	752.895.261	762.169.733	(1,22)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	840.049	200.819	318,31
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	35.908.470	0
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	12.939.521	2.994	432.081,73
Jumlah	766.674.831	798.282.016	(3,96)

Bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 terjadi penurunan nilai pendapatan pada Tahun 2025 sebesar 3,96 persen yang berasal dari penurunan penerimaan pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan, dan penerimaan dari pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut.

A. Pengakuan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp752.895.261,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp86.608.333,00;
- 2) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebesar Rp223.768.667,00;
- 3) PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp161.127.000,00;
- 4) Koperasi "Pecanderaan" sebesar Rp99.511.333,00;
- 5) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp153.238.328,00; dan
- 6) Kantor Notaris Mina NG sebesar Rp28.641.600,00.

B. Pengakuan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Tahun 2025 sebesar Rp840.049,00 seluruhnya berasal dari Satker Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bunga Rekening Bank IIPC Seoul sebesar Rp311.862,00;
- 2) Bunga Rekening Bank IIPC Tokyo sebesar Rp23.159,00;
- 3) Bunga Rekening Bank IIPC Taipei sebesar Rp381.340,00;

- 4) Bunga Rekening Bank IIPC London sebesar Rp74.230,00;
 - 5) Pengakuan atas Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp62.540,00 atas selisih kurs rekening bank pada IIPC Tokyo sebesar Rp47.662,70 dan IIPC Seoul sebesar Rp14.970,00; dan
 - 6) Koreksi pengakuan atas bunga bank pada IIPC Seoul sebesar (Rp13.082,00).
- C. Pengakuan Pendapatan Anggaran Lain-lain T.A. 2024 sebesar Rp12.939.521,00 berasal dari Satker Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal berupa:
- 1) Kelebihan atas pengembalian deposit sewa *venue World Economic Forum* (WEF) 2025 Davos sebesar Rp11.583.000,00;
 - 2) Kelebihan nilai pengembalian Uang Muka Kerja (UMK) IIPC Beijing sebesar Rp620.550,00; dan
 - 3) Kelebihan nilai pengembalian UMK IIPC London sebesar Rp735.971,00.

Terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Pend-LRA	Pend-LO	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	457.212.000	752.895.261	(295.683.261)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	790.591	840.049	(49.458)
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	12.939.521	12.939.521	-
Jumlah	470.942.112	766.674.831	(295.732.719)

Perbedaan nilai sebesar Rp(295.732.719,00) disebabkan perbedaan metode pencatatan dimana Pendapatan-LRA menggunakan *cash basis* sementara Pendapatan-LO menggunakan *accrual basis*. Penjelasan atas selisih per jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Selisih nilai pendapatan sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp(295.683.261,00) berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas pendapatan sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yang secara riil diakui sebagai pendapatan di tahun 2025.
- 2) Selisih nilai pendapatan jasa lembaga keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp(49.458,00) berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas pendapatan atas Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) yang secara riil diakui sebagai pendapatan di tahun 2025.

Beban
Pegawai

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp295.539.105.210,00 dan Rp240.921.172.808,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.2.
Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024	% naik/(turun)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	91.139.954.573	79.668.008.476	14,44
Beban Tunjangan Lain-lain Pejabat Negara	-	186.900.170	(100,00)
Beban Gaji dan Tunjangan Non PNS	2.578.403.120	1.110.741.400	132,13
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	3.132.940.152	1.080.172.770	190,04
Beban Honorarium	8.681.480.239	7.571.357.344	14,66
Beban Lembur	167.448.000	73.633.000	127,41
Beban Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	189.838.879.126	151.230.359.648	25,53
Jumlah	295.539.105.210	240.921.172.808	22,67

Terdapat perbedaan nilai antara realisasi Belanja-LRA dengan Beban-LO per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Uraian	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	90.914.361.891	91.139.954.573	(225.592.682)
Beban Gaji dan Tunjangan Non PNS	2.578.403.120	2.578.403.120	-
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	3.132.940.152	3.132.940.152	-
Beban Honorarium	8.770.382.763	8.681.480.239	88.902.524
Beban Lembur	167.448.000	167.448.000	-
Beban Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	189.906.916.949	189.838.879.126	68.037.823
Jumlah	295.470.452.875	295.539.105.210	(68.652.335)

Perbedaan nilai sebesar Rp(68.652.335,00) disebabkan perbedaan metode pencatatan dimana Belanja-LRA menggunakan *cash basis* sementara Beban-LO menggunakan *accrual basis*. Penjelasan atas selisih per jenis belanja adalah sebagai berikut:

- 1) Selisih nilai Beban Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp(225.592.682,00) berasal dari jurnal penyesuaian atas beban gaji dan tunjangan PNS yang secara rill diakui sebagai beban pada tahun 2025;

- 2) Selisih nilai Beban Honorarium sebesar Rp88.902.524,00 berasal dari jurnal penyesuaian atas beban uang honor tetap yang secara riil diakui sebagai beban pada tahun 2025;
- 3) Selisih nilai Beban Tunjangan khusus dan belanja pegawai transito sebesar Rp68.037.823,00 berasal dari jurnal penyesuaian atas beban tunjangan khusus/kinerja PNS dan PPPK yang secara riil diakui sebagai beban pada tahun 2025;

D.3 Beban Persediaan

Beban
Persediaan

Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.838.299.158,00 dan Rp4.402.439.685,00. Beban persediaan berasal dari pemakaian persediaan barang konsumsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.3.
Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024	% naik/(turun)
Beban Persediaan Konsumsi	2.838.299.158	4.402.439.685	(35,53)
Jumlah	2.838.299.158	4.402.439.685	(35,53)

Terdapat perbedaan nilai antara Belanja Persediaan pada LRA dengan Beban Persediaan LO per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Uraian	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih
Belanja Barang Persediaan	2.555.338.168	2.838.299.158	(282.960.990)
Jumlah	2.555.338.168	2.838.299.158	(282.960.990)

Perbedaan nilai sebesar Rp(282.960.990,00) disebabkan karena perbedaan metode pencatatan dimana Belanja Barang Persediaan pada LRA menggunakan *cash basis* sementara beban persediaan pada LO menggunakan *accrual basis*. Pada LRA Belanja Barang Persediaan dihitung berdasarkan nilai persediaan yang dibeli di tahun 2025, sementara beban persediaan pada LO dihitung berdasarkan nilai persediaan yang terpakai pada tahun 2025.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban
Barang dan
Jasa

Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp327.960.122.658,00 dan Rp568.904.361.616,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.4.
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024	% naik/(turun)
Beban Barang Operasional	45.735.831.177	45.358.126.404	0,83
Beban Barang Non Operasional	25.441.626.602	55.552.551.762	(54,20)
Beban Langganan Daya dan Jasa	9.450.470.072	10.555.013.020	(10,46)
Beban Jasa Konsultan	52.673.750.120	136.887.870.292	(61,52)
Beban Sewa	74.761.973.401	90.398.504.200	(17,30)
Beban Fasilitas Sewa Rumah untuk Perwakilan R.I. di Luar Negeri	10.256.407.899	9.491.175.718	8,06
Beban Jasa Profesi	5.041.378.000	8.449.086.059	(40,33)
Beban Jasa Lainnya	104.598.685.387	212.212.034.161	(50,71)
Jumlah	327.960.122.658	568.904.361.616	(42,35)

Bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 terjadi penurunan nilai beban sebesar 42,35 persen pada tahun 2025. Hal ini terjadi karena adanya penurunan secara signifikan pada Beban Barang Non Operasional, Beban Jasa Konsultan, Beban Jasa Profesi, dan Beban Jasa Lainnya.

Terdapat perbedaan nilai antara Belanja Barang dan Jasa pada LRA dengan Beban Barang dan Jasa pada LO per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Uraian	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih
Beban Barang Operasional	45.937.354.934	45.735.831.177	201.523.757
Beban Barang Non Operasional	25.347.416.404	25.441.626.602	(94.210.198)
Beban Langganan Daya dan Jasa	9.479.908.371	9.450.470.072	29.438.299
Beban Jasa Konsultan	55.633.488.530	52.673.750.120	2.959.738.410
Beban Sewa	68.910.966.907	74.761.973.401	(5.851.006.494)
Beban Fasilitas Sewa Rumah untuk Perwakilan R.I. di Luar Negeri	10.256.407.899	10.256.407.899	0
Beban Jasa Profesi	5.041.378.000	5.041.378.000	0
Beban Jasa Lainnya	94.174.137.926	104.598.685.387	(10.424.547.461)
Jumlah	314.781.058.971	327.960.122.658	(13.179.063.687)

Perbedaan nilai sebesar Rp(13.179.063.687,00) disebabkan karena perbedaan metode pencatatan dimana belanja barang dan jasa pada LRA menggunakan *cash*

basis sementara beban barang dan jasa pada LO menggunakan *accrual basis*. Penjelasan atas selisih per jenis belanja adalah sebagai berikut:

- 1) Selisih nilai beban barang operasional sebesar Rp201.523.757,00 berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas beban barang operasional yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2025.
- 2) Selisih nilai beban barang non operasional sebesar Rp(94.210.198,00) berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas beban barang non operasional yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2025.
- 3) Selisih nilai beban langganan daya dan jasa sebesar Rp29.438.299,00 berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas beban langganan daya dan jasa yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2025.
- 4) Selisih nilai beban jasa konsultan sebesar Rp2.959.738.410,00 berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas beban jasa konsultan yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2025.
- 5) Selisih nilai beban sewa sebesar Rp(5.851.006.494,00) berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas beban sewa yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2025.
- 6) Selisih nilai beban jasa lainnya sebesar Rp(10.424.547.461,00) berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas beban jasa lainnya yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2025.

D.5 Beban Pemeliharaan

Belanja
Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.393.081.891,00 dan Rp15.873.066.245,00, dengan rincian:

Tabel D.5.
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024	% naik/(turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.087.668.825	8.814.415.035	(19,59)
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	354.715.167	464.467.743	(23,63)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.504.668.462	5.790.202.567	(4,93)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.396.149.197	610.685.500	128,62
Beban Pemeliharaan Lainnya	47.197.200	193.295.400	(75,58)
Beban Persediaan Barang untuk pemeliharaan	2.683.040	-	100,00
Jumlah	14.393.081.891	15.873.066.245	(9,32)

Terdapat perbedaan nilai antara Belanja pemeliharaan pada LRA dengan Beban pemeliharaan pada LO per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Uraian	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.647.867.398	7.087.668.825	1.560.198.573
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	354.715.167	354.715.167	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.504.668.462	5.504.668.462	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.396.149.197	1.396.149.197	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	47.197.200	47.197.200	-
Beban Persediaan Barang untuk pemeliharaan	0	2.683.040	(2.683.040)
Jumlah	15.950.597.424	14.393.081.891	1.557.515.533

Selisih sebesar Rp1.557.515.533,00 berasal dari

- Pencatatan biaya penggantian lantai marmer yang semula dibebankan pada akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kemudian dikapitalisasi menjadi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.545.548.793,00;
- Pencatatan biaya pengadaan karpet lantai yang semula dibebankan pada akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kemudian dikapitalisasi menjadi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.649.780,00; dan
- Pencatatan pembelian barang persediaan konsumsi menggunakan akun LRA 521811, yang dicatat sebagai barang untuk pemeliharaan berupa pembelian diffuser, sehingga pemakaian atas barang persediaan tersebut tercatat sebagai beban persediaan barang untuk pemeliharaan sebesar Rp2.683.040,00.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp67.264.399.486,00 dan Rp202.175.321.588,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.6.
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024	% naik/(turun)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.005.290.516	134.350.276.148	(69,48)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	26.259.108.970	67.825.045.440	(61,28)
Jumlah	67.264.399.486	202.175.321.588	(66,73)

Bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024, pada Tahun Anggaran 2025 Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri mengalami penurunan yang signifikan.

Tidak terdapat perbedaan antara Belanja perjalanan dinas pada LRA dengan beban perjalanan dinas pada LO per 31 Desember 2025.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp117.024.423.052,00 dan Rp91.521.216.230,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.8.
Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024	% naik/(turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	28.221.465.062	28.684.281.540	(1,61)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.070.454.251	14.210.193.836	13,09
Beban Penyusutan Jaringan	123.797.493	123.797.493	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	76.597.362	76.597.362	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	85.383.750	51.875.625	64,59
Beban Amortisasi <i>Software</i>	72.316.638.423	48.240.528.516	49,91
Beban Amortisasi Lisensi	127.965.429	133.941.858	(4,46)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	2.121.282	-	100,00
Jumlah	117.024.423.052	91.521.216.230	27,87

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban
Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp189.191,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.8.
Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024	% naik/(turun)
Beban Persediaan Konsumsi	189.191	0	100,00
Jumlah	189.191	0	100,00

D.9 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Rincian Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.9.
Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024	% naik/(turun)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional	2.403.445.020	7.863.292.850	(69,43)
Pendapatan Pelepasan Aset	33.015.000	-	100,00
Pendapatan dari penerimaan klaim asuransi BMN	45.618.026	-	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	187.077.856	29.004.250	545,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	1.613.040.065	7.834.288.600	(79,41)
Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	6.474.600	-	100,00
Pendapatan Selisih Kurs belum terealisasi	518.219.473	-	100,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional	81.225.118	4.509.881.176	(98,20)
Beban Pelepasan Aset	79.759.447	3.841.653.213	(97,92)
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.465.671	243.692.820	(99,40)
Beban Persediaan Rusak/Usang	-	424.532.381	(100,00)
Beban lain lain	-	2.762	(100,00)
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	2.322.219.902	3.353.411.674	(30,54)

Penjelasan atas rincian kegiatan non operasional sebesar Rp2.322.219.902,00 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan pelepasan aset sebesar Rp33.015.000,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa penerimaan hasil Lelang atas penjualan BMN.
2. Pendapatan dari penerimaan klaim asuransi BMN sebesar Rp45.618.026,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa pengembalian *No Claim Bonus* atas polis asuransi BMN pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp187.077.856,00 merupakan pengembalian atas pembayaran belanja pegawai pada Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara di Tahun 2025.

4. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp1.613.040.065,00 merupakan pengembalian atas pembayaran belanja Barang pada Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara di Tahun 2025.
5. Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp6.474.600,00 merupakan seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama berupa setoran dari Sisa Utang TP/TGR ASN yang disetorkan melalui PT Taspen Persero.
6. Pendapatan selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp518.219.473,00 berasal dari perhitungan penyesuaian nilai Deposit Sewa Kantor IIPC per 31 Desember 2025 menggunakan mata uang asing yang kemudian disajikan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah BI pada Satker Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal.
7. Beban Pelepasan Aset sebesar Rp79.759.447,00 merupakan beban yang timbul akibat penghapusan 3 (tiga) unit Lisensi *SSL Certificate* yang sudah habis manfaatnya namun masih memiliki nilai buku sebesar Rp79.759.447,00 pada Satker Sekretariat Utama.
8. Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp1.465.671,00 seluruh berasal dari Satuan Kerja Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal atas Pekerjaan Langganan Data Penunjang Kegiatan Promosi Investasi (Statista) sebesar Rp332.706,00 dan Langganan Data Penunjang Kegiatan Promosi Investasi (FDI Markets) sebesar Rp1.132.965,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.311.950.043.091,00 dan Rp2.288.895.571.531,00.

E.2 Surplus/(Defisit) LO

Surplus/Defisit LO Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(821.930.725.913,00) dan Rp(1.119.645.884.482,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Transaksi Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sama sebesar Rp0,00.

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Korreksi Nilai Persediaan Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sama sebesar Rp0,00.

E.5 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian kembali Aset Tetap yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018 dan hasil perbaikan pada Tahun 2019. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sama masing-masing sebesar Rp0,00.

E.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Korreksi Nilai Aset Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(614.312.885,00) dan Rp(316.903.265,00). Koreksi ini berasal dari Transaksi Koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi nilai aset non revaluasi untuk periode 31 Desember 2025 sebesar Rp(614.312.885,00) seluruhnya berasal dari satker Sekretariat Utama dengan rincian:

- i) Koreksi pencatatan atas 12 (dua belas) unit AC Split perolehan tahun 2024 yang semula dicatat sebagai asset Gedung dan Bangunan kemudian dikoreksi pada Semester II tahun 2025 menjadi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.605.881,00, dan
- ii) Koreksi pencatatan biaya penggantian lantai marmer yang semula dibebankan pada akun belanja Pemeliharaan kemudian dikapitalisasi menjadi Aset Peralatan dan Mesin Rp(618.918.766,00).

E.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(11.264,00) dan Rp(419.143.824,00). Koreksi lain-lain pada periode tahun 2025 berasal dari koreksi pencatatan penyisihan piutang tak tertagih tahun 2024 yang sebelumnya tidak disisihkan.

E.8 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp801.952.205.476,00 dan Rp1.143.436.403.131,00. Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN. Rincian transaksi antar entitas sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	807.238.614.076
Diterima dari Entitas Lain	(5.286.408.600)
Jumlah	801.952.205.476

E.8.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima Dari Entitas Lain/Ditagihkan Ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp807.238.614.076,00 sedangkan DDEL sebesar Rp(5.286.408.600,00).

E.9 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.291.357.198.505,00 dan Rp2.311.950.043.091,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Catatan Penting Lainnya atas Laporan Realisasi Anggaran

a. Capaian Output Strategis K/L

Selama Tahun Anggaran 2025 *output* strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah sebagai berikut:

- 1) Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder untuk TA. 2025 adalah Rp780,90 Triliun. Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder merupakan realisasi penanaman modal sektor sekunder yang diraih baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di luar migas, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, usaha mikro dan usaha kecil. Adapun ruang lingkup sektor sekunder meliputi:
 1. Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya;
 2. Industri Makanan;
 3. Industri Kimia dan Farmasi;
 4. Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi lain;
 5. Industri Kertas dan Percetakan;
 6. Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam;
 7. Industri Tekstil;
 8. Industri Karet dan Plastik;
 9. Industri Mineral Non-Logam;
 10. Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki;
 11. Industri Kayu; dan
 12. Industri Lainnya;
- 2) Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi untuk TA. 2025 mencapai Rp584,1 Triliun atau 112,03% dari target realisasi. Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi berfokus pada upaya untuk mengoptimalkan penanaman modal yang bernilai tambah, yaitu penanaman modal yang menciptakan nilai tambah dari bahan baku menjadi barang jadi

atau setengah jadi melalui peningkatan peran penanaman modal di sektor hilirisasi;

- 3) Capaian Persentase Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM untuk TA. 2025 mencapai 53,4% dari total realisasi investasi.
- 4) Capaian Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) berorientasi Ekspor untuk TA. 2025 mencapai 46,6% dari total realisasi investasi.
- 5) Capaian Nilai PMDN berorientasi Ekspor untuk TA. 2025 mencapai Rp58,30 Triliun atau 96,52% dari target realisasi.
- 6) Capaian Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan untuk TA. 2025 mencapai Rp445,80 Triliun atau 145,16% dari target realisasi.
- 7) Capaian Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa untuk TA. 2025 mencapai 51,3 Triliun atau sebesar 98,51% dari target realisasi. Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa ditetapkan dalam rangka mengejar pemerataan ekonomi khususnya untuk wilayah di luar Jawa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas investasi untuk mencapai pemerataan yang ditujukan terhadap wilayah-wilayah di luar Jawa; dan
- 8) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk TA. 2025 mencapai indeks 78,13 dari target indeks 76,20.

b. Capaian *Output* per Fungsi APBN

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terdapat pada fungsi Ekonomi (04) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam **Lampiran 12** laporan keuangan ini.

c. Capaian *Output* per Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dari 8 (delapan) Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari atas Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Prioritas Nasional 5 – Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan. PN 5 memiliki 29 (dua puluh sembilan) kegiatan prioritas, 56 (lima puluh enam) rincian output, dan 4.436 (empat ribu empat ratus tiga puluh enam) capaian volume output yang tersebar di 8 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp268.812.163.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp220.574.789.831,00. Rincian program prioritas nasional disajikan dalam **Lampiran 13** laporan keuangan ini.

Catatan Penting Lainnya atas Neraca

- 1) Pada bagian Aset Lain-lain yang dimiliki oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) per tanggal 31 Desember 2025, terdapat deposit sewa ruang kantor perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di luar negeri, *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC), sebesar Rp7.011.983.188,00 yang masih berada pada pihak pemilik Gedung. Pelaksanaan pembayaran atas sewa kantor dimaksud dilakukan secara tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, dalam Surat Perjanjian Sewa yang telah disepakati antara kedua belah pihak, juga telah ditetapkan masa sewa yang mencakup rincian lebih lanjut mengenai periode sewa serta ketentuan lain yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait penggunaan ruang kantor. Selain itu dalam Perjanjian Sewa juga telah ditetapkan masa/periode sewa dengan rincian sebagai berikut:

No	Pemilik Gedung (<i>Lessor</i>)	IIPC (<i>Lessee</i>)	Periode Kontrak	
			Mulai	Berakhir
1	Fukoku Mutual Seimei Insurance Company	Tokyo, Jepang	1 Juni 2024	31 Mei 2027
2	Suntec Real Estate Investment Trust	Singapura	15 Mei 2025	30 Juni 2028
3	Servcorp Administration Services Ltd	Abu Dhabi, UEA	1 April 2022	31 Maret 2025
			1 April 2025	31 Maret 2028
4	Sherwood 370 Lexington LLC (d/h)	New York, USA	1 April 2021	31 Mei 2026
5	Landmark Space Limited	London, Inggris	1 Januari 2025	31 Desember 2025
6	Dexus Property Group	Sydney, Australia	1 Januari 2025	31 Desember 2027
7	SIFC Tower One Development YH	Seoul, Korea Selatan	13 Januari 2024	12 Januari 2027

Jakarta, **08 MAY 2026**

Menteri Investasi dan Hilirisasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosan Perkasa Roeslani

**RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN : 2025**

A. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

B. VISI : Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045

C. MISI : 01 Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
: 02 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

D. FUNGSI : 04 EKONOMI

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2025	2026	2027	2028
	<u>Sasaran Strategis</u> Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Nilai PMA/PMDN Sektor Sekunder	855,9	1.006,5	1.226,2	1.456,9
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)	48,3	48,6	49,0	49,3
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Nilai PMA/PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan	307,1	346,8	401,0	452,9
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Nilai PMA berorientasi ekspor	171,6	205,3	253,6	306,4
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Nilai PMDN berorientasi ekspor	60,4	71,9	88,3	106,0
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi	521,4	586,6	675,6	779,3
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa	52,1	52,4	52,7	52,9
	<u>Sasaran Strategis</u> Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	76,20	77,34	78,50	79,68
	<u>Sasaran Strategis</u> Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Nilai Reformasi Birokrasi BKPM	A/ (>80% - 90%)			

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2025	2026	2027	2028
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Opini atas laporan keuangan BKPM	WTP			
065.01	Eselon 1 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	681,880,285	693,197,688	705,920,002	721,345,587
ED	Program Program Penanaman Modal dan Hilirisasi	272,638,673	276,825,010	281,531,353	287,237,713
	Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Perencanaan Umum dan Perencanaan Strategis Penanaman Modal serta Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Indikator Kinerja Program Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan Indeks Kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal Indeks Kualitas Penyusunan Potensi/Peluang Penanaman Modal Sektoral	3,40 (Skala 4) 3,40 (Skala 4) 3,40 (Skala 4)	3,41 (Skala 4) 3,41 (Skala 4) 3,41 (Skala 4)	3,42 (Skala 4) 3,42 (Skala 4) 3,42 (Skala 4)	3,43 (Skala 4) 3,43 (Skala 4) 3,43 (Skala 4)
	Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal untuk Mendukung Peningkatan Iklim Penanaman Modal Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal	3.40 (Skala 4)	3.41 (Skala 4)	3.42 (Skala 4)	3.43 (Skala 4)
	Sasaran Program Meningkatnya implementasi kerjasama penanaman modal Indikator Kinerja Program Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal dalam dan luar negeri yang disepakati Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama di bidang Penanaman Modal yang telah ditindaklanjuti Persentase DPMPSTSP dan K/L yang berkategori baik dalam penilaian kinerja	100 75,0 75,00	100 75,5 75,50	100 76,0 76,00	100 76,5 76,50
	Sasaran Program Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal Indikator Kinerja Program Nilai rencana penanaman modal Persentase investor potensial yang memperoleh Nomor Induk Berusaha dan/atau Nomor Kegiatan Usaha	3.343,16 50,0	3.816,25 50,0	4.504,33 50,1	5.209,89 50,1
	Sasaran Program Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif Indikator Kinerja Program Persentase capaian realisasi investasi berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko	90 90	91 90	92 90	93 90

	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya	90	90	90	90
	Sasaran Program Meningkatnya kualitas Hilirisasi Investasi Strategis Indikator Kinerja Program Persentase rencana aksi strategi dan tata kelola di bidang hilirisasi yang ditindaklanjuti	70	75	80	85
	Sasaran Program Meningkatnya realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis Indikator Kinerja Program Persentase capaian realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis	60,0	60.5	61.0	61.5
	Sasaran Program Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal Indikator Kinerja Program Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang ditindaklanjuti Persentase peningkatan kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM Persentase Peningkatan Pemanfaatan Profil Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah	80,0 5,00 10	80,5 5,25 11	81,0 5,50 12	81,5 5,75 13
	Sasaran Program Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Berusaha yang Optimal Indikator Kinerja Program Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS) Persentase permohonan badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (insentif kepabeanan dan insentif perpajakan)	15,00 100	15,01 100	15,02 100	15,03 100
	Sasaran Program Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat	3,55	3,57	3,60	3,62
	Sasaran Program Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Teknologi Informasi Penanaman Modal Indikator Kinerja Program Persentase Penyelesaian Program Strategis Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal	59	59	62	62
	Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi Penanaman Modal Indikator Kinerja Program Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi	3,41	3,42	3,43	3,44
3213	KEGIATAN Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal SASARAN KEGIATAN Meningkatnya kualitas kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Persentase rekomendasi peningkatan daya saing investasi yang ditindaklanjuti - Persentase rekomendasi kebijakan regulasi perizinan	7,613,115 80 Persen 80,0 Persen	7,850,742 80,5 Persen 80,5 Persen	8,117,876 81,0 Persen 81,0 Persen	8,441,779 81,5 Persen 81,5 Persen

	berusaha berbasis risiko di pusat dan di daerah yang ditindaklanjuti - Persentase rekomendasi terkait sinkronisasi kebijakan investasi yang ditindaklanjuti - Persentase Kebijakan Ekosisten Investasi yang Terintegrasi dan Kebijakan Insentif untuk Mendorong Investasi yang Berdaya Saing	80,0 Persen	80,5 Persen	81,0 Persen	81,5 Persen
		0 Persen	80,5 Persen	81,0 Persen	81,5 Persen
PBB	KRO Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	7,613,115	7,850,742	8,117,876	8,441,779
	INDIKATOR KRO				
	KEGIATAN				
3214	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah	2,952,942	3,011,526	3,077,386	3,157,238
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya kualitas potensi penanaman modal dan hilirisasi di daerah				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Persentase daerah yang data potensi penanaman modal dan hilirisasi yang termutakhirkan sesuai kriteria	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
FBA	KRO Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2,952,942	3,011,526	3,077,386	3,157,238
	INDIKATOR KRO				
	KEGIATAN				
3215	Pemberdayaan Usaha Nasional	3,000,000	3,059,517	3,126,426	3,207,551
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Persentase kesepakatan kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar PMA/PMDN yang difasilitasi terhadap komitmen kemitraan dari Usaha Besar PMA/PMDN	25 Persen	25,05 Persen	25,10 Persen	25,15 Persen
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya kualitas fasilitasi kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKM				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Persentase Pelaku UMKM yang telah dilakukan penguatan kapasitas untuk mendukung rantai pasok Usaha Besar (UB)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
QDG	KRO Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3,000,000	3,059,517	3,126,426	3,207,551
	INDIKATOR KRO				
	KEGIATAN				
3216	Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal	52,047,222	52,052,031	52,057,437	52,063,992
	SASARAN KEGIATAN Terwujudnya kualitas promosi yang efektif di dalam negeri				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Nilai rencana penanaman modal dari promosi Penanaman Modal Dalam Negeri	1.784,8 Rp Triliun	1.850,9 Rp Triliun	2.207,1 Rp Triliun	2.568,5 Rp Triliun

BMA	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Tersedianya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Investor potensial yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Nomor Kegiatan Usaha (NKU) - Persentase perusahaan asing yang berhasil difasilitasi untuk melakukan relokasi dan diversifikasi geografis ke Indonesia - Indeks kualitas strategi promosi penanaman modal	110 Investor 100 Persen 3,6 Indeks	130 Investor 100 Persen 3,6 Indeks	148 Investor 100 Persen 3,6 Indeks	166 Investor 100 Persen 3,6 Indeks
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Terwujudnya promosi investasi sektor hilirisasi yang efektif				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Nilai Rencana Penanaman Modal di sektor hilirisasi	0 Rp Triliun	1.115,6 Rp Triliun	1.334,2 Rp Triliun	1.570,5 Rp Triliun
	<u>KRO</u> Data dan Informasi Publik	18,197,222	18,197,222	18,197,222	18,197,222
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	2,050,000	2,054,809	2,060,215	2,066,770
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u> Promosi	31,800,000	31,800,000	31,800,000	31,800,000
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan IIPC (Indonesian Investment Promotion Center)	110 investor potensial	426 investor potensial	426 investor potensial	426 investor potensial
3225	<u>KEGIATAN</u> Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha	3,025,640	3,125,053	3,236,810	3,372,316
BAC	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya efektivitas dan harmonisasi pelayanan fasilitas berusaha				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Persentase usulan pemberian fasilitas berusaha (Insentif Kepabeanaan dan Insentif Perpajakan)	90 Persen	92 Persen	94 Persen	96 Persen
	<u>KRO</u> Pelayanan Publik kepada badan usaha	3,025,640	3,125,053	3,236,810	3,372,316
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I	5,923,285	6,029,488	6,148,887	6,293,659
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah I				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah I berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen
	- Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah I	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen
	- Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah I	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen
	- Persentase fasilitasi badan usaha Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat diselesaikan permasalahannya	80 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Persen
	- Persentase Fasilitasi Realisasi Investasi Sektor Industri Padat	0 Badan Usaha	80 Badan Usaha	81 Badan Usaha	82 Badan Usaha

	Karya				
	<u>KRO</u>				
BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	835,870	848,668	863,054	880,499
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u>				
BMA	Data dan Informasi Publik	2,174,407	2,217,539	2,266,035	2,324,836
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u>				
QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	2,913,008	2,963,281	3,019,798	3,088,324
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u>				
3227	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II	7,326,691	7,461,886	7,613,876	7,798,171
	<u>SASARAN KEGIATAN</u>				
	Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan yang Efektif berdasarkan pelaksanaan kegiatan di Wilayah II				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah II berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen
	- Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah II	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen
	- Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah II	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen
	- Persentase fasilitasi pengembangan investasi berorientasi ekspor	0 Persen	80 Persen	81 Persen	82 Persen
	<u>KRO</u>				
BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1,599,990	1,631,732	1,667,416	1,710,685
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u>				
BMA	Data dan Informasi Publik	3,772,050	3,846,878	3,931,004	4,033,010
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u>				
QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1,954,651	1,983,276	2,015,456	2,054,476
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u>				
3228	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III	6,618,042	6,743,837	6,885,270	7,056,753
	<u>SASARAN KEGIATAN</u>				
	Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan yang Efektif berdasarkan pelaksanaan kegiatan di Wilayah III				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Persentase capaian realisasi investasi berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi di Wilayah III	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen
	- Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berbasis risiko di Wilayah III	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen
	- Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen

	permasalahannya di Wilayah III				
	<u>KRO</u>				
BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1,879,980	1,917,277	1,959,206	2,010,045
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u>				
BMA	Data dan Informasi Publik	3,295,068	3,357,370	3,427,423	3,512,357
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u>				
QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1,442,994	1,469,190	1,498,641	1,534,351
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u>				
3229	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	22,413,481	22,849,404	23,339,631	23,934,004
	<u>SASARAN KEGIATAN</u>				
	Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan yang Efektif berdasarkan pelaksanaan kegiatan di Wilayah IV				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah IV berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen
	- Persentase proyek yang dipantau perkembangan realisasinya pada 38 Provinsi dalam rangka Dekonsentrasi	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen
	- Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah IV	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen
	- Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah IV	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen
	<u>KRO</u>				
BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	2,264,990	2,306,855	2,353,920	2,410,985
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u>				
BEI	Bantuan Lembaga	14,000,000	14,274,620	14,583,507	14,958,011
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u>				
BMA	Data dan Informasi Publik	4,181,274	4,264,225	4,357,483	4,470,552
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u>				
QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1,967,217	2,003,704	2,044,721	2,094,456
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u>				
3230	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal	1,443,021	1,447,085	1,451,654	1,457,193

QDB	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan kerja sama pelaksanaan berusaha				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha yang diimplementasikan	0 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya Implementasi Kerjasama Pelaksanaan Berusaha di Bidang Penanaman Modal				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Persentase Pemerintah Daerah dan Kementerian/ Lembaga yang telah melaksanakan rekomendasi kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	60,0 Persen	62,5 Persen	65,0 Persen	67,5 Persen
3231	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,443,021	1,447,085	1,451,654	1,457,193
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u>				
	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur	2,300,000	2,347,294	2,400,479	2,464,971
ABB	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur	3,40 Indeks (skala	3,41 Indeks (skala	3,42 Indeks (skala	3,43 Indeks (skala
	- Indeks Kualitas Potensi/Peluang Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur	3,40 Indeks	3,41 Indeks	3,42 Indeks	3,43 Indeks
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur				
PBB	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur	3,40 Indeks (skala	3,41 Indeks (skala	3,42 Indeks (skala	3,43 Indeks (skala
	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	850,000	874,230	901,477	934,518
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u>				
QDH	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1,000,000	1,017,161	1,036,455	1,059,852
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u>				
	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	450,000	455,903	462,547	470,601
3232	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u>				
	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur	2,200,000	2,253,855	2,314,405	2,387,820

	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Jumlah Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Industri Manufaktur - Jumlah Percepatan Rencana Proyek di Bidang Industri Manufaktur - Jumlah Profil Proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Industri Manufaktur - Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan pada Bidang Industri Manufaktur - Jumlah Kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal				
		1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		3 Proyek	3 Proyek	3 Proyek	3 Proyek
		1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	1 Profil Proyek
		0 Proyek	3 Proyek	3 Proyek	3 Proyek
		0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		1 Kajian	0 Kajian	0 Kajian	0 Kajian
ABB	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	750,000	776,316	805,905	841,780
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
PBB	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1,000,000	1,018,613	1,039,539	1,064,910
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
QDH	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	450,000	458,926	468,961	481,130
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
3233	<u>KEGIATAN</u> Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan	1,703,688	1,739,611	1,780,018	1,829,009
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Jasa dan Kawasan <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan - Indeks Kualitas Potensi/Peluang Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan	3,40 Indeks	3,41 Indeks	3,42 Indeks	3,43 Indeks
		3,40 Indeks	3,41 Indeks	3,42 Indeks	3,43 Indeks
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan	3,40 Indeks	3,41 Indeks	3,42 Indeks	3,43 Indeks
ABB	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	403,688	416,321	430,528	447,755
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
PBB	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1,000,000	1,017,346	1,036,854	1,060,506
	<u>INDIKATOR KRO</u>				

QDH	<u>KRO</u> Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha <u>INDIKATOR KRO</u> <u>KEGIATAN</u>	300,000	305,944	312,636	320,748
3234	Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) <u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	300,000	305,946	312,638	320,751
QDH	<u>KRO</u> Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha <u>INDIKATOR KRO</u> <u>KEGIATAN</u>	300,000	305,946	312,638	320,751
5089	Fasilitas Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta <u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	1,200,000	1,223,797	1,250,562	1,283,012
QDH	<u>KRO</u> Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha <u>INDIKATOR KRO</u> <u>KEGIATAN</u>	1,200,000	1,223,797	1,250,562	1,283,012
5264	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat <u>SASARAN KEGIATAN</u> - <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - <u>KRO</u>	2,422,506	2,458,968	2,499,959	2,549,658
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan <u>INDIKATOR KRO</u> <u>KEGIATAN</u>	2,422,506	2,458,968	2,499,959	2,549,658
5265	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur <u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Infrastruktur	1,881,254	1,926,208	1,976,762	2,038,069

ABB	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal bidang Infrastruktur	3,40 Indeks	3,41 Indeks	3,42 Indeks	3,43 Indeks
	- Indeks kualitas Penyusunan Potensi/Peluang Penanaman Modal Bidang Infrastruktur	3,40 Indeks	3,40 Indeks	3,42 Indeks	3,43 Indeks
	<u>SASARAN KEGIATAN</u>				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur	3,40 Indeks	3,41 Indeks	3,42 Indeks	3,43 Indeks
	<u>KRO</u>				
	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	350,000	366,716	385,512	408,304
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
PBB	<u>KRO</u>				
	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	931,254	947,693	966,185	988,611
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
QDH	<u>KRO</u>				
	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	600,000	611,799	625,065	641,154
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
6482	<u>KEGIATAN</u>				
	Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal	4,802,580	4,886,250	4,980,308	5,094,348
	<u>SASARAN KEGIATAN</u>				
	Meningkatnya Implementasi Kerjasama Bilateral di Bidang Penanaman Modal				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Persentase kerja sama penanaman modal dengan mitra kerja sama dari dalam dan luar negeri yang disepakati	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	- Persentase kesepakatan/perjanjian/rekomendasi kebijakan kerja sama bilateral di bidang penanaman modal yang telah ditindaklanjuti	75 Persen	75,5 Persen	76 Persen	76,5 Persen
	<u>KRO</u>				
	Kerja sama	4,802,580	4,886,250	4,980,308	5,094,348
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
6483	<u>KEGIATAN</u>				
	Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal	7,738,405	7,901,177	8,084,164	8,306,025
	<u>SASARAN KEGIATAN</u>				
	Meningkatnya Implementasi Kerjasama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal yang Disepakati	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	- Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal yang telah ditindaklanjuti	75 Persen	75,5 Persen	76 Persen	76,5 Persen
	- Persentase minat pelaku usaha Indonesia yang melakukan kegiatan investasi ke luar negeri (Outward Investment)	64,5 Persen	64,6 Persen	64,7 Persen	64,8 Persen

PEB	<u>KRO</u> Forum	200,000	203,022	206,421	210,541
	<u>INDIKATOR KRO</u> 				
PEC	<u>KRO</u> Kerja sama	7,538,405	7,698,155	7,877,743	8,095,484
	<u>INDIKATOR KRO</u> 				
6777	<u>KEGIATAN</u> Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya layanan informasi perizinan berusaha berbasis risiko				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Persentase pelaku usaha yang diberikan layanan informasi perizinan berusaha berbasis risiko	75,00 Persen	75,01 Persen	75,02 Persen	75,03 Persen
BMB	<u>KRO</u> Komunikasi Publik	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	<u>INDIKATOR KRO</u> 				
6778	<u>KEGIATAN</u> Promosi Wilayah Amerika dan Eropa	18,334,583	18,816,814	19,358,891	20,016,150
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Terwujudnya kualitas Promosi yang Efektif di Wilayah Amerika dan Eropa				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Nilai Rencana Penanaman Modal di Wilayah Amerika dan Eropa	274,7 Rp	337,4 Rp (Triliun)	394,3 Rp (Triliun)	453,4 Rp (Triliun)
PEG	<u>KRO</u> Konferensi dan Event	6,860,000	7,058,410	7,281,440	7,551,860
	<u>INDIKATOR KRO</u> 				
PEH	<u>KRO</u> Promosi	11,474,583	11,758,404	12,077,451	12,464,290
	<u>INDIKATOR KRO</u> 				
6779	<u>KEGIATAN</u> Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	6,089,265	6,207,971	6,341,422	6,503,226
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Terwujudnya kualitas Promosi yang Efektif di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Nilai Rencana Penanaman Modal di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	588,4 Rp (Triliun)	9839,3 Rp	981,0 Rp (Triliun)	1.127,9 Rp

PEG	<u>KRO</u> Konferensi dan Event	1,291,005	1,303,478	1,317,501	1,334,504
	<u>INDIKATOR KRO</u> 				
PEH	<u>KRO</u> Promosi	4,798,260	4,904,493	5,023,921	5,168,722
	<u>INDIKATOR KRO</u> 				
6780	<u>KEGIATAN</u> Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	4,960,950	5,007,154	5,059,094	5,122,074
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Terwujudnya kualitas Promosi yang Efektif di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Nilai Rencana Penanaman Modal dari Promosi Penanaman Modal Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	695,3 Rp (Triiun)	788,7 Rp (Triiun)	921,9 Rp (Triiun)	1.060,1 Rp
PEG	<u>KRO</u> Konferensi dan Event	701,247	713,294	726,837	743,258
	<u>INDIKATOR KRO</u> 				
PEH	<u>KRO</u> Promosi	4,259,703	4,293,860	4,332,257	4,378,816
	<u>INDIKATOR KRO</u> 				
6781	<u>KEGIATAN</u> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V	6,554,201	6,625,643	6,705,968	6,803,357
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah V				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah V berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen
	- Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah V	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen
	- Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah V	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen
BDH	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	917,940	936,151	956,625	981,448
	<u>INDIKATOR KRO</u> 				
BMA	<u>KRO</u> Data dan Informasi Publik	1,383,047	1,406,455	1,432,778	1,464,693
	<u>INDIKATOR KRO</u> 				

FAE	<u>KRO</u> Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,300,000	1,326,719	1,356,755	1,393,174
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
QAH	<u>KRO</u> Pelayanan Publik Lainnya	2,700,086	2,700,086	2,700,086	2,700,086
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
QDH	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	253,128	256,232	259,724	263,956
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
6782	<u>KEGIATAN</u> Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	2,252,980	2,252,980	2,252,980	2,252,980
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya efektivitas dan kemudahan perizinan berusaha sektor industri dalam mendukung realisasi penanaman modal				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Persentase peningkatan Nomor Kegiatan Usaha (NKU) sektor industri yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS) - Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha sektor industri	5,00 Persen 88,0 Persen	5,01 Persen 88,1 Persen	5,02 Persen 88,2 Persen	5,03 Persen 88,3 Persen
QDH	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	2,252,980	2,252,980	2,252,980	2,252,980
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
6783	<u>KEGIATAN</u> Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	2,253,010	2,253,010	2,253,010	2,253,010
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya efektivitas dan kemudahan perizinan berusaha sektor non industri				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Persentase Nomor Kegiatan Usaha (NKU) sektor non industri yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS)	5,00 Persen	5,01 Persen	5,02 Persen	5,03 Persen
BDH	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	2,253,010	2,253,010	2,253,010	2,253,010
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
6784	<u>KEGIATAN</u> Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan	7,500,000	7,615,564	7,745,501	7,903,048
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi, strategis bidang Perkebunan dan Kehutanan				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Meningkatnya realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi, strategis bidang Perkebunan dan Kehutanan	30,37 Rp (Triliun)	34,20 Rp (Triliun)	40,74 Rp (Triliun)	48,63 Rp (Triliun)

	- Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa Sawit - Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa	1.489.335 RP 392.210 Rp Juta	1.659.739 RP 454.674 Rp Juta	1.849.640 RP 527.620 Rp Juta	2.061.269 RP 611.030 Rp Juta
PBB	KRO Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	4,500,000	4,561,053	4,629,702	4,712,938
	INDIKATOR KRO				
QDH	KRO Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	3,000,000	3,054,511	3,115,799	3,190,110
	INDIKATOR KRO				
6785	KEGIATAN Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	51,164,905	52,205,177	53,374,535	54,792,365
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya efektivitas pengelolaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Persentase ketersediaan layanan sistem OSS RBA	95,0 Persen	95,1 Persen	95,2 Persen	95,3 Persen
UAB	KRO Sistem Informasi Pemerintahan	51,164,905	52,205,177	53,374,535	54,792,365
	INDIKATOR KRO				
6786	KEGIATAN Pengelolaan Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan	23,630,055	24,147,713	24,729,610	25,435,149
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya efektivitas pengelolaan sistem layanan elektronik, infrastruktur dan jaringan				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Ketersediaan aplikasi website Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menjaga layanan dari downtime kurang dari 1 persen	1 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen
	- Nilai Indeks Kematangan Teknologi Informasi/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0 Indeks (Skala 5)	3,01 Indeks	3,03 Indeks	3,05 Indeks
	- Persentase ketersediaan jaringan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional dan kegiatan pelayanan perizinan berusaha	99,5 Persem	0 Persem	0 Persem	0 Persem
	- Tingkat ketersediaan layanan infrastruktur, jaringan dan keamanan informasi	N/A Persen	99,50 Persen	99,51 Persen	99,52 Persen
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem layanan elektronik, infrastruktur dan jaringan				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Indeks kepuasan ketersediaan layanan teknologi informasi penanaman modal	3,60 Indeks	3,60 Indeks	3,61 Indeks	3,62 Indeks
QMA	KRO Data dan Informasi Publik	1,000,000	1,021,463	1,045,589	1,074,842
	INDIKATOR KRO				

UAB	KRO Sistem Informasi Pemerintahan	22,630,055	23,126,250	23,684,021	24,360,307
	INDIKATOR KRO KEGIATAN 6787 Pengelolaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	2,986,852	3,019,309	3,055,794	3,100,035
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan informasi penanaman modal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,5 Indeks	2,8 Indeks	3,0 Indeks	3,2 Indeks
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya kualitas layanan data dan informasi penanaman modal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Indeks kepuasan pengguna layanan data dan informasi	3,40 Indeks	3,43 Indeks	3,48 Indeks	3,50 Indeks
FAB	KRO Sistem Informasi Pemerintahan	2,986,852	3,019,309	3,055,794	3,100,035
	INDIKATOR KRO				
WA	Program Program Dukungan Manajemen	409,241,612	416,372,678	424,388,649	434,107,874
	Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel dan Transparan Indikator Kinerja Program Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,67	3,70	3,73	3,76
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	76,78 (BB)	77,16 (BB)	77,54 (BB)	77,91 (BB)
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	84,36 (Baik/4)	86,62 (Baik/4)	87,75 (Baik/4)	90,01 (Sangat
	Indeks Reformasi Hukum	90,00	98,97	98,98	98,98
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	2,70 (Skala 4)	2,80 (Skala 4)	3,00 (Skala 4)	3,20 (Skala 4)
	Sasaran Program Terwujudnya organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran serta birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional Indikator Kinerja Program Nilai Evaluasi Kelembagaan	89,00	89,25	89,50	89,75
	Sasaran Program Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Berakhlak dan Profesional Indikator Kinerja Program Nilai Sistem Merit	285	290	295	300

3204	<u>KEGIATAN</u> Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM	1,737,280	1,737,280	1,737,280	1,737,280
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya efektifitas layanan audit internal				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Nilai Internal Audit Capability Model	3,06 Nilai	3,06 Nilai	3,07 Nilai	3,08 Nilai
	<u>KRO</u> EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,737,280	1,737,280	1,737,280	1,737,280
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
3205	<u>KEGIATAN</u> Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal	373,983,448	381,114,514	389,130,485	398,849,710
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya efektifitas pengelolaan kelembagaan dan keuangan penanaman modal				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Indeks Pengelolaan Aset	3,69 Indeks	3,72 Indeks	3,75 Indeks	3,78 Indeks
	- Persentase laporan keuangan yang tersusun secara baik sesuai ketentuan perundang-undangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	- Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	72,97 Nilai	73 Nilai	74 Nilai	75 Nilai
	- Indeks Tata Kelola Pengadaan	50 Indeks	55 Indeks	60 Indeks	65 Indeks
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya kualitas pengelolaan kelembagaan dan keuangan penanaman modal				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Indeks kepuasan layanan umum dan keuangan	3,51 Indeks	3,53 Indeks	3,55 Indeks	3,57 Indeks
	<u>KRO</u> EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	366,399,406	373,530,472	381,546,443	391,265,668
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBB	<u>KRO</u> Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBC	<u>KRO</u> Layanan Manajemen SDM Internal	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBD	<u>KRO</u> Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,584,042	1,584,042	1,584,042	1,584,042
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u> Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,217,732	2,217,732	2,217,732	2,217,732

	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan aparatur daerah bidang penanaman modal dan hilirisasi				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Persentase ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional, struktural dan teknis serta memiliki sertifikat kelulusan - Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang penanaman modal dan hilirisasi di pusat dan daerah yang lulus sesuai dengan kriteria	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen
	<u>KRO</u> Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
DCF					
	<u>KRO</u> Layanan Manajemen SDM Internal	1,209,930	1,209,930	1,209,930	1,209,930
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBC					
3210	<u>KEGIATAN</u> Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM	1,007,802	1,007,802	1,007,802	1,007,802
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya efektifitas perencanaan anggaran dan pengelolaan kinerja organisasi				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Nilai rata-rata LHE AKIP Internal - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	2,231,808	2,231,808	2,231,808	2,231,808
	<u>KRO</u> Layanan Manajemen Kinerja Internal				
EBD					
6774	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u> Penyempurnaan Produk Hukum dan Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal	76,63 Nilai	76,97 Nilai	77,32 Nilai	77,66 Nilai
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum penanaman modal	78,95 Nilai	79,21 Nilai	79,48 Nilai	79,74 Nilai
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Indeks kualitas peraturan perundang-undangan dan layanan hukum	2,231,808	2,231,808	2,231,808	2,231,808
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum penanaman modal				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Indeks kualitas peraturan perundang-undangan dan layanan hukum	2,521,500	2,521,500	2,521,500	2,521,500
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya efektivitas pelayanan advokasi hukum penanaman modal				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Persentase terselenggaranya pelayanan advokasi hukum di bidang penanaman modal	3,55 Indeks	0 Indeks (Skala 4)	0 Indeks (Skala 4)	0 Indeks (Skala 4)
EBA	<u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	<u>INDIKATOR KRO</u>	2,521,500	2,521,500	2,521,500	2,521,500

6775	<u>KEGIATAN</u> Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat	7,488,020	7,488,020	7,488,020	7,488,020
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya pelayanan hubungan masyarakat				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Presentase opini negatif pemberitaan K/L pada media	25 persen	25 persen	25 persen	25 persen
	<u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,488,020	7,488,020	7,488,020	7,488,020
6776	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u> Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat	19,061,824	19,061,824	19,061,824	19,061,824
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan, kehumasan dan ketatausahaan pimpinan				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Indeks kepuasan masyarakat atas layanan keprotokolan, kehumasan dan ketatausahaan pimpinan	3,56 Indeks	3,57 Indeks	3,58 Indeks	3,59 Indeks
EBA	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya persepsi dan akses informasi publik melalui pengelolaan informasi yang terbuka				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Persentase opini negatif dibanding total pemberitaan tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada media	12 Persen	11,9 Persen	11,8 Persen	11,7 Persen
	- Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,90 Nilai	96,00 Nilai	96,10 Nilai	96,20 Nilai
	<u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal	18,553,198	18,553,198	18,553,198	18,553,198
EBD	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u> Layanan Manajemen Kinerja Internal	508,626	508,626	508,626	508,626
	<u>INDIKATOR KRO</u>				

F. RINCIAN BIAYA

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2025
1	2
Eselon 1	
<u>065.01-2025 - KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL</u>	681,880,285
<u>1. KELOMPOK BIAYA</u>	
NON_OPERASIONAL	321,644,354
OPERASIONAL	360,235,931
<u>2. JENIS BELANJA</u>	
BELANJA PEGAWAI	252,291,969

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2025
1	2
BELANJA MODAL	36,233,181
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA LAIN-LAIN	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA BARANG DAN JASA	393,355,135
BELANJA HIBAH	0
3. SUMBER DANA	
RM	681,880,285
PINJ. VALAS	0
HDN	0
HIBAH RHLN	0
PDN	0
SA-BLU	0
HIBAH LUAR LANGSUNG	0
L.COST/RMP	0
STM	0
RPLN	0
PDN	0
HDN LANGSUNG	0
SBSN-PBS	0
BLU	0
HIBAH VALAS	0
PNBP	0

<u>1. TOTAL KELOMPOK BIAYA K/L</u>	
NON_OPERASIONAL	321,644,354
OPERASIONAL	360,235,931
<u>2. TOTAL JENIS BELANJA K/L</u>	
BELANJA BARANG DAN JASA	393,355,135
BELANJA PEGAWAI	252,291,969
BELANJA MODAL	36,233,181
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA LAIN-LAIN	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA HIBAH	0
<u>3. TOTAL SUMBER DANA K/L</u>	
RM	681,880,285
PINJ. VALAS	0
HDN	0
HIBAH RHLN	0
PDN	0
SA-BLU	0
HIBAH LUAR LANGSUNG	0
L.COST/RMP	0
STM	0
RPLN	0
PDN	0
HDN LANGSUNG	0
SBSN-PBS	0
BLU	0
HIBAH VALAS	0
PNBP	0

G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN.

KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	2025	2026	2027	2028
065.01.WA	Program Dukungan Manajemen	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNB	457,212	2,035,300	1	457,212
	TOTAL	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNB	457,212	2,035,300	1	457,212

Jakarta, 23/9/2026



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-065.01-0/2025**



DS:0499-0801-0700-0804

A. DASAR HUKUM :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 065 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 065.01 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| 3. PAGU | : | Rp.681.880.285.000
(ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH) |

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

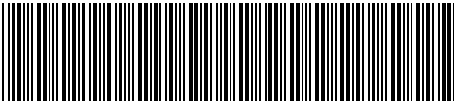
- DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025



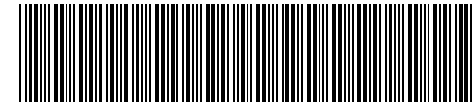
DS:0499-0801-0700-0804

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

A. IDENTITAS UNIT :				
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	:	065	KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	
2. UNIT ORGANISASI	:	01	KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	
3. PAGU	:	Rp.681.880.285.000		
(ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)				
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :				(dalam ribuan rupiah)
1. PROGRAM	:	065.01.ED	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi	272.638.673
		065.01.WA	Program Dukungan Manajemen	409.241.612
2. SASARAN STRATEGIS K/L	:	01	Meningkatnya realisasi penanaman modal	
	:	02	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal	
	:	03	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	
3. FUNGSI	:	04	EKONOMI	681.880.285
SUB FUNGSI	:	0490	EKONOMI LAINNYA	681.880.285
4. PRIORITAS NASIONAL	:	05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	190.842.197
NON PRIORITAS NASIONAL	:			491.038.088



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025



DS:0499-0801-0700-0804

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 2 dari 12

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
065.01.ED	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi		272.638.673
SP01	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal		
IKP01	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal	4,0 Indeks (skala 5)	
SP02	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal		
IKP01	Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha (starting a business)	3/3 HariProsedur	
IKP02	Jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM	205 Perusahaan	
SP03	Meningkatnya kualitas kerjasama penanaman modal		
IKP01	Kesepakatan/perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan	69 Kesepakatanperjanjianperunding	
SP04	Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal		
IKP01	Jumlah Minat Penanaman Modal	9.100 Minat	
IKP02	Nilai Komitmen Penanaman Modal	2.065,5 Triliun (Rp)	
SP05	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal		
IKP01	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	3,50 Indeks (skala 4)	
SP06	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal		
IKP01	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking)	143 Perusahaan	
SP07	Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis		
IKP01	Fasilitasi Investasi Strategis Melalui Hilirisasi	Fasilitasi	
SP08	Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal		
IKP01	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks (Skala 5)	



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025**



DS:0499-0801-0700-0804

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 3 dari 12

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
SP09	Meningkatnya pelayanan informasi perizinan berusaha berbasis resiko			
IKP01	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan informasi perizinan berusaha berbasis resiko	3	indeks	
3213	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal			7.613.115
	01.01 Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha	2	Usulan rekomendasi	
	01.02 Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2	Usulan rekomendasi	
	01.03 Jumlah Usulan Rekomendasi Terkait Sinkronisasi Kebijakan Investasi	1	Usulan Rekomendasi	
	01.04 Jumlah Usulan Rekomendasi terkait Kebijakan Ekosistem Investasi yang Terintegrasi dan Kebijakan Insentif untuk Mendorong Investasi yang Berdaya Saing	0	Usulan Rekomendasi	
3214	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah			2.952.942
	01.01 Jumlah Fasilitas Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah	38	Daerah	
	01.02 Jumlah Daerah yang Terpetakan Potensi Investasi	0	Dokumen	
3215	Pemberdayaan Usaha Nasional			3.000.000
	01.01 Jumlah Kemitraan Usaha Nasional	0	Kemitraan	
	01.02 Jumlah Data Perusahaan PMA/PMDN Yang Wajib Bermitra Dan Pelaku UMKM Di Daerah Yang Siap Dimitrakan	0	Paket Buku	
	01.03 Jumlah Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Nasional	0	UMKM	
	01.04 Jumlah Fasilitas bagi Pelaku UMKM dalam Rantai Pasok	500	UMKM	
	01.05 Jumlah Badan Usaha Investasi Besar Bermitra dengan UMKM	0	Badan Usaha	
3216	Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal			52.047.222
	01.01 Jumlah Analisis Market Intelligence Negara dan Sektor Prioritas Promosi Investasi	0	Laporan	
	01.02 Jumlah Kegiatan Regional Investment Forum	0	Kegiatan	
	01.03 Jumlah Bahan-Bahan Informasi Potensi Penanaman Modal	1	Jenis Sarana Promosi	
	01.04 Jumlah Analisis Negara Target dan Negara Pesaing	2	Kajian	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025



DS:0499-0801-0700-0804

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 4 dari 12

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
3225	01.05 Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan IIPC (Indonesian Investment Promotion Center)	0	Potensial Investor	3.025.640
	01.06 Jumlah Perusahaan Asing yang berhasil difasilitasi untuk melakukan relokasi dan diversifikasi ke Indonesia	0	Perusahaan	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha			
	01.01 Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas Berusaha terkait Masterlist	200	Badan Usaha	
	01.02 Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas Berusaha terkait Tax Allowance	18	Badan usaha	
	01.03 Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas Berusaha terkait Tax Holiday	18	Badan Usaha	
3226	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I			5.923.285
	01.01 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di Wilayah I	327	Triliun (Rp)	
	01.02 Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah I	14	Badan Usaha	
	01.03 Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah I	16	Badan Usaha	
	01.04 Jumlah Badan Usaha yang Mendapatkan Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi	0	Badan Usaha	
	01.05 Jumlah Badan Usaha yang Menerima Fasilitas Penanaman Modal	0	Badan Usaha	
	01.06 Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN	2	Badan Usaha	
	01.07 Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan asistensi pendampingan konsultasi subsistem pengawasan pada sistem OSS	0	Layanan	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II			
	01.01 Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di Wilayah II	354,74	Triliun (Rp)	
3227	01.02 Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah II	15	Badan Usaha	7.326.691
	01.03 Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah II	26	Badan Usaha	
	01.04 Jumlah Badan Usaha yang dilakukan pengembangan di Wilayah -wilayah Tertentu	0	Daerah	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025



DS:0499-0801-0700-0804

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 5 dari 12

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
3228	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III			6.618.042
01.01	Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di Wilayah III	560	Triliun (Rp)	
01.02	Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah III	30	Badan Usaha	
01.03	Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah III	21	Badan Usaha	
01.04	Jumlah Badan Usaha dalam rangka Eksekusi Realisasi Investasi pada proyek yang terkendala di Wilayah Barat	0	Badan Usaha	
01.05	Jumlah Badan Usaha dalam rangka Pengawasan Percepatan Realisasi Investasi Hijau Berkelanjutan	0	Badan usaha	
3229	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV			22.413.481
01.01	Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di Wilayah IV	384,49	Triliun (Rp)	
01.02	Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah IV	35	Badan Usaha	
01.03	Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah IV	21	Badan Usaha	
01.04	Jumlah Lembaga yang Menerima Dana Dekonsentrasi Pemantauan Realisasi Investasi	38	Lembaga	
01.05	Jumlah Badan Usaha dalam rangka Eksekusi Realisasi Investasi pada proyek yang terkendala di Wilayah Timur	0	Badan Usaha	
3230	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal			1.443.021
01.01	Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha K/L yang Ditetapkan Kinerjanya	564	Lembaga	
3231	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sumber Daya Alam			2.300.000
01.01	Jumlah Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam	1	Kajian	
01.02	Jumlah Percepatan Rencana proyek Strategis Sektor Sumber Daya Alam	3	Proyek	
01.03	Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Sumber Daya Alam	1	Profil proyek	
01.04	Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Sumber Daya Alam	0	Proyek	
01.05	Jumlah Dokumen Rencana Strategis 2025-2029	1	Rekomendasi Kebijakan	
01.06	Jumlah Laporan Penerapan Investasi Berkelanjutan di Bidang Sumber Daya Alam	0	Kajian	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025



DS:0499-0801-0700-0804

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 6 dari 12

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
3232	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur			2.200.000
	01.01 Jumlah Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Industri Manufaktur	1	Kajian	
	01.02 Jumlah Percepatan Rencana Proyek di Bidang Industri Manufaktur	3	Proyek	
	01.03 Jumlah Profil Proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Industri Manufaktur	1	Profil Proyek	
	01.04 Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan pada Bidang Industri Manufaktur	0	Proyek	
	01.05 Jumlah Kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota	0	Kegiatan	
	01.06 Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal	1	Kajian	
3233	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan			1.703.688
	01.01 Jumlah Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan	1	Kajian	
	01.02 Jumlah Percepatan Rencana Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan	2	Proyek	
	01.03 Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan pada Bidang Jasa dan Kawasan	0	Proyek	
	01.04 Jumlah Dokumen IPRO Bidang Jasa dan Kawasan	1	Profil Proyek	
	01.05 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Investasi di Kawasan Ekonomi sebagai Lokasi Strategis	0	Kawasan	
	01.06 Jumlah Dokumen Rumusan Isu Penguatan Strategi dan Inovasi Perencanaan Penanaman Modal	0	Dokumen Rumusan Isu	
3234	Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)			300.000
	01.01 Jumlah Penyelesaian Masalah Strategis di KEK	2	Badan Usaha	
5089	Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta			1.200.000
	01.01 Jumlah Percepatan Rencana Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	3	Proyek	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025



DS:0499-0801-0700-0804

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 7 dari 12

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
5264	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat		2.422.506
01.01	Tingkat Mutu Pelayanan di PTSP Pusat	IKM 3,5 dari skala 4	
5265	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur		1.881.254
01.01	Jumlah Kajian Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	1 Kajian	
01.02	Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur	1 Profil Proyek	
01.03	Jumlah Percepatan Rencana Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	3 Proyek	
01.04	Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Infrastruktur	0 Proyek	
01.05	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Analisa Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur	1 Kajian	
6482	Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal		4.802.580
01.01	Jumlah konsultasi publik bahan posisi pertemuan kerja sama bilateral dan mitra kerja sama	0 Rekomendasi Kebijakan	
01.02	Jumlah hasil perundingan kerja sama penanaman modal bilateral	19 Kesepakatan	
01.03	Jumlah kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha dalam dan luar negeri	6 Kesepakatan	
01.04	Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan kesepakatan dan implementasi kerja sama bilateral di bidang penanaman modal	0 Rekomendasi Kebijakan	
6483	Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal		7.738.405
01.01	Jumlah konsultasi publik bahan posisi pertemuan kerja sama regional dan multilateral	0 Rekomendasi Kebijakan	
01.02	Jumlah Forum Fasilitasi Outward Investment	6 Forum	
01.03	Jumlah hasil perundingan kerja sama penanaman modal regional dan multilateral	21 Kesepakatan	
01.04	Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan kesepakatan dan implementasi kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal	0 Rekomendasi Kebijakan	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025



DS:0499-0801-0700-0804

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 8 dari 12

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
6777	Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		10.000.000
01.01	Jumlah Pelaku Usaha yang Diberikan Layanan Informasi Penanaman Modal	0 orang	
6778	Promosi Wilayah Amerika dan Eropa		18.334.583
01.01	Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Amerika dan Eropa	378,138 Triliun (Rp)	
01.02	Jumlah kegiatan pelaksanaan forum Internasional di Wilayah Amerika dan Eropa	2 Kegiatan	
01.03	Jumlah kegiatan Promosi di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Amerika dan Eropa	1 Kegiatan	
6779	Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika		6.089.265
01.01	Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	878,149 Triliun (Rp)	
01.02	Jumlah kegiatan pelaksanaan forum Internasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika	2 Kegiatan	
01.03	Jumlah kegiatan Promosi di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika	1 Kegiatan	
6780	Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik		4.960.950
01.01	Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	935,97 Triliun (Rp)	
01.02	Jumlah kegiatan pelaksanaan forum Internasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	2 Kegiatan	
01.03	Jumlah kegiatan Promosi di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	1 Kegiatan	
6781	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V		6.554.201
01.01	Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Terpantau di Wilayah V	105 Triliun (Rp)	
01.02	Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah V	30 Badan Usaha	
01.03	Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah V	6 Badan Usaha	
01.04	Jumlah Penanganan Kasus dalam rangka Percepatan Investasi	0 Layanan	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025



DS:0499-0801-0700-0804

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 9 dari 12

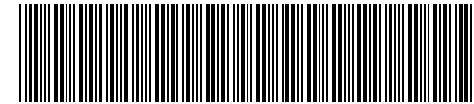
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
6782	01.05 Jumlah Laporan Verifikasi Pelaksanaan Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko	0 Laporan	2.252.980
	01.06 Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Evaluasi dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal dan Dana Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3 Laporan	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri		
	01.01 Jumlah Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Industri	0 Pelaku Usaha	
6783	01.02 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberian NIB Kepada Pelaku Usaha	0 Kegiatan	2.253.010
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri		
	01.01 Jumlah Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	0 Pelaku Usaha	
	01.02 Jumlah Kajian untuk optimalisasi implementasi OSS untuk kemudahan pendaftaran usaha dan perizinan investasi berkelanjutan di Indonesia	0 Kajian	
6784	Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan		7.500.000
	01.01 Jumlah Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	5 Badan Usaha	
	01.02 Jumlah Kajian Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	0 Rekomendasi Kebijakan	
	01.03 Jumlah Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	1 Rekomendasi Kebijakan	
	01.04 Jumlah Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi	5 Badan Usaha	
	01.05 Jumlah Kajian Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi	0 Rekomendasi Kebijakan	
	01.06 Jumlah Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Minyak dan Gas Bumi	1 Rekomendasi Kebijakan	
	01.07 Jumlah Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara	5 Badan Usaha	
	01.08 Jumlah Kajian Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara	0 Rekomendasi Kebijakan	
	01.09 Jumlah Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Mineral dan Batubara	1 Rekomendasi Kebijakan	
	01.10 Jumlah Peta Peluang Hilirisasi Investasi Strategis di Sektor Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	0 Rekomendasi Kebijakan	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025



DS:0499-0801-0700-0804

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 10 dari 12

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
6785	01.11 Jumlah Peta Peluang Hilirisasi Investasi Strategis di Sektor Minyak dan Gas Bumi	0 Rekomendasi Kebijakan	51.164.905
	01.12 Jumlah Peta Peluang Hilirisasi Investasi Strategis di Sektor Mineral dan Batubara	0 Rekomendasi Kebijakan	
6786	Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		23.630.055
	01.01 Pemeliharaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	1 Sistem Informasi	
6787	Pengelolaan Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan		2.986.852
	01.01 Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0 dari skala 5	
	01.02 Kualitas Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi	0 dari skala 100%	
	01.03 Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Aplikasi dan Layanan Elektronik	0 dari skala 5	
	01.04 Jumlah pemeliharaan data center dan DRC yang mendukung OSS	1 Sistem Informasi	
	01.05 Jumlah Pengembangan Website Penanaman Modal	1 Sistem Informasi	
065.01.WA	Pengelolaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal		409.241.612
	01.01 Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1 Sistem Informasi	
	01.02 Nilai Indeks Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	0 dari skala 5	
SP01	Program Dukungan Manajemen Terwujudnya ASN BKPM yang kompeten, profesional dan berintegritas		409.241.612
IKP01	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	77,5% Indeks	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025



DS:0499-0801-0700-0804

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 11 dari 12

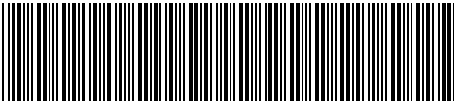
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
SP02	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien		
IKP01	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	A / (>80%-90%) PredikatNilai	
IKP02	Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKPM	3 Level	
SP03	Terkelolanya anggaran BKPM yang akuntabel		
IKP01	Nilai kinerja anggaran BKPM	Baik / (>80%-90%) Predikat Nilai	
3204	Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM		1.737.280
	01.01 Nilai Internal Audit Capability Model	0 Nilai	
3205	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal		373.983.448
	01.01 Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0 Unit	
	01.02 Indeks kepuasan pengguna layanan SDM	0 Skala (5)	
	01.03 Penyusunan laporan keuangan	0 Laporan	
	01.04 Persentase utilisasi aset K/L	0 %	
	01.05 Indeks penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	0 Skala (5)	
	01.06 Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	
	01.07 Indeks Kepuasan Layanan Umum	0 Skala (5)	
	01.08 Jumlah Peralatan Fasilitas Perkantoran	0 unit	
	01.09 Renovasi Gedung dan Bangunan	0 m2	
3208	Pengembangan Sumber Daya Manusia		2.217.732
	01.01 Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Struktural dan Teknis Internal	0 Orang	
	01.02 Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penanaman Modal Internal dan Eksternal	0 Orang	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025



DS:0499-0801-0700-0804

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
3210	Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM		2.231.808
	01.01 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	0 Dokumen	
	01.02 Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	0 Dokumen	
6774	Penyempurnaan Produk Hukum dan Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal		2.521.500
	01.01 Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan	0 Skala 4	
	01.02 Indeks ketepatan waktu penyelesaian telaahan hukum	0 Skala 4	
6775	Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat		7.488.020
	01.01 Presentase opini negatif pemberitaan K/L pada media	0 persen	
6776	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Tata Usaha		19.061.824
	01.01 Indeks ketepatan waktu persiapan pelayanan keprotokoleran pimpinan	0 skala 4	
	01.02 Indeks Kepuasan Layanan Umum	0 skala 5	

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

Rosan Perkasa Roeslani
NIP. 3174053112680002



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025



DS:0499-0801-0700-0804

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 1 dari 8

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 065 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2. UNIT ORGANISASI : 065.01 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
3. PAGU : Rp.681.880.285.000
(ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	065.01.ED	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi		0	241.405.492	31.233.181	0	272.638.673	272.638.673
	01	DKI JAKARTA		0	227.904.629	31.233.181	0	259.137.810	259.137.810
	650101	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA	DK	0	499.137	0	0	499.137	499.137
	A00	RM		0	499.137	0	0	499.137	499.137
	650102	KANTOR DEPUTI BIDANG HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS	KP	0	7.500.000	0	0	7.500.000	7.500.000
	A00	RM		0	7.500.000	0	0	7.500.000	7.500.000
	650103	KANTOR DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL	KP	0	46.548.631	31.233.181	0	77.781.812	77.781.812
	A00	RM		0	46.548.631	31.233.181	0	77.781.812	77.781.812
	664848	KANTOR DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	KP	0	13.566.057	0	0	13.566.057	13.566.057
	A00	RM		0	13.566.057	0	0	13.566.057	13.566.057
	664852	KANTOR DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL	KP	0	81.432.020	0	0	81.432.020	81.432.020
	A00	RM		0	81.432.020	0	0	81.432.020	81.432.020
	664869	KANTOR DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	KP	0	13.984.006	0	0	13.984.006	13.984.006
	A00	RM		0	13.984.006	0	0	13.984.006	13.984.006
	664873	KANTOR DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL	KP	0	19.954.136	0	0	19.954.136	19.954.136
	A00	RM		0	19.954.136	0	0	19.954.136	19.954.136
	664880	KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	KP	0	34.835.700	0	0	34.835.700	34.835.700
	A00	RM		0	34.835.700	0	0	34.835.700	34.835.700
	670650	KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	KP	0	9.584.942	0	0	9.584.942	9.584.942

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025



DS:0499-0801-0700-0804

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 2 dari 8

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 065 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2. UNIT ORGANISASI : 065.01 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
3. PAGU : Rp.681.880.285.000
(ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	A00	RM		0	9.584.942	0	0	9.584.942	9.584.942
	02	JAWA BARAT		0	659.567	0	0	659.567	659.567
	029002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI	DK	0	659.567	0	0	659.567	659.567
	A00	RM		0	659.567	0	0	659.567	659.567
	03	JAWA TENGAH		0	611.657	0	0	611.657	611.657
	039002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	DK	0	611.657	0	0	611.657	611.657
	A00	RM		0	611.657	0	0	611.657	611.657
	04	DI YOGYAKARTA		0	336.020	0	0	336.020	336.020
	049001	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH	DK	0	336.020	0	0	336.020	336.020
	A00	RM		0	336.020	0	0	336.020	336.020
	05	JAWA TIMUR		0	535.695	0	0	535.695	535.695
	050016	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	DK	0	535.695	0	0	535.695	535.695
	A00	RM		0	535.695	0	0	535.695	535.695
	06	ACEH		0	256.452	0	0	256.452	256.452
	060038	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH	DK	0	256.452	0	0	256.452	256.452
	A00	RM		0	256.452	0	0	256.452	256.452
	07	SUMATERA UTARA		0	330.171	0	0	330.171	330.171
	079001	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA	DK	0	330.171	0	0	330.171	330.171
	A00	RM		0	330.171	0	0	330.171	330.171

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025



DS:0499-0801-0700-0804

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 3 dari 8

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 065 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2. UNIT ORGANISASI : 065.01 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
3. PAGU : Rp.681.880.285.000
(ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	08	SUMATERA BARAT		0	252.689	0	0	252.689	252.689
	080022	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM &PTSP) PROV.	DK	0	252.689	0	0	252.689	252.689
	A00	RM		0	252.689	0	0	252.689	252.689
	09	RIAU		0	433.307	0	0	433.307	433.307
	099001	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU	DK	0	433.307	0	0	433.307	433.307
	A00	RM		0	433.307	0	0	433.307	433.307
	10	JAMBI		0	313.175	0	0	313.175	313.175
	100098	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM DAN PTSP)	DK	0	313.175	0	0	313.175	313.175
	A00	RM		0	313.175	0	0	313.175	313.175
	11	SUMATERA SELATAN		0	424.365	0	0	424.365	424.365
	119002	DINAS PANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA	DK	0	424.365	0	0	424.365	424.365
	A00	RM		0	424.365	0	0	424.365	424.365
	12	LAMPUNG		0	305.641	0	0	305.641	305.641
	120020	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG	DK	0	305.641	0	0	305.641	305.641
	A00	RM		0	305.641	0	0	305.641	305.641
	13	KALIMANTAN BARAT		0	504.421	0	0	504.421	504.421
	139001	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI	DK	0	504.421	0	0	504.421	504.421
	A00	RM		0	504.421	0	0	504.421	504.421
	14	KALIMANTAN TENGAH		0	450.415	0	0	450.415	450.415

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025



DS:0499-0801-0700-0804

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 4 dari 8

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 065 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2. UNIT ORGANISASI : 065.01 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
3. PAGU : Rp.681.880.285.000
(ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	140020	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN	DK	0	450.415	0	0	450.415	450.415
	A00	RM		0	450.415	0	0	450.415	450.415
	15	KALIMANTAN SELATAN		0	322.874	0	0	322.874	322.874
	159002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN	DK	0	322.874	0	0	322.874	322.874
	A00	RM		0	322.874	0	0	322.874	322.874
	16	KALIMANTAN TIMUR		0	551.257	0	0	551.257	551.257
	169001	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI	DK	0	551.257	0	0	551.257	551.257
	A00	RM		0	551.257	0	0	551.257	551.257
	17	SULAWESI UTARA		0	305.782	0	0	305.782	305.782
	170029	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI	DK	0	305.782	0	0	305.782	305.782
	A00	RM		0	305.782	0	0	305.782	305.782
	18	SULAWESI TENGAH		0	415.121	0	0	415.121	415.121
	180015	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI	DK	0	415.121	0	0	415.121	415.121
	A00	RM		0	415.121	0	0	415.121	415.121
	19	SULAWESI SELATAN		0	309.213	0	0	309.213	309.213
	190099	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI	DK	0	309.213	0	0	309.213	309.213
	A00	RM		0	309.213	0	0	309.213	309.213
	20	SULAWESI TENGGARA		0	302.119	0	0	302.119	302.119
	200028	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI	DK	0	302.119	0	0	302.119	302.119

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025



DS:0499-0801-0700-0804

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 5 dari 8

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 065 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2. UNIT ORGANISASI : 065.01 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
3. PAGU : Rp.681.880.285.000
(ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	A00 RM			0	302.119	0	0	302.119	302.119
	21 MALUKU			0	302.177	0	0	302.177	302.177
	210023 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU		DK	0	302.177	0	0	302.177	302.177
	A00 RM			0	302.177	0	0	302.177	302.177
	22 BALI			0	508.329	0	0	508.329	508.329
	220022 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI		DK	0	508.329	0	0	508.329	508.329
	A00 RM			0	508.329	0	0	508.329	508.329
	23 NUSA TENGGARA BARAT			0	491.836	0	0	491.836	491.836
	230024 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTB		DK	0	491.836	0	0	491.836	491.836
	A00 RM			0	491.836	0	0	491.836	491.836
	24 NUSA TENGGARA TIMUR			0	413.770	0	0	413.770	413.770
	249002 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA		DK	0	413.770	0	0	413.770	413.770
	A00 RM			0	413.770	0	0	413.770	413.770
	26 BENGKULU			0	234.407	0	0	234.407	234.407
	260028 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU		DK	0	234.407	0	0	234.407	234.407
	A00 RM			0	234.407	0	0	234.407	234.407
	28 MALUKU UTARA			0	426.785	0	0	426.785	426.785
	280023 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU		DK	0	426.785	0	0	426.785	426.785
	A00 RM			0	426.785	0	0	426.785	426.785

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025



DS:0499-0801-0700-0804

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 6 dari 8

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 065 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2. UNIT ORGANISASI : 065.01 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
3. PAGU : Rp.681.880.285.000
(ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	29	BANTEN		0	303.458	0	0	303.458	303.458
	290018	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) PROVINSI	DK	0	303.458	0	0	303.458	303.458
	A00	RM		0	303.458	0	0	303.458	303.458
	30	KEP. BANGKA BELITUNG		0	301.229	0	0	301.229	301.229
	300015	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN	DK	0	301.229	0	0	301.229	301.229
	A00	RM		0	301.229	0	0	301.229	301.229
	31	GORONTALO		0	230.369	0	0	230.369	230.369
	310090	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	DK	0	230.369	0	0	230.369	230.369
	A00	RM		0	230.369	0	0	230.369	230.369
	32	KEPULAUAN RIAU		0	514.438	0	0	514.438	514.438
	320082	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN	DK	0	514.438	0	0	514.438	514.438
	A00	RM		0	514.438	0	0	514.438	514.438
	33	PAPUA BARAT		0	272.262	0	0	272.262	272.262
	330082	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	DK	0	272.262	0	0	272.262	272.262
	A00	RM		0	272.262	0	0	272.262	272.262
	34	SULAWESI BARAT		0	309.185	0	0	309.185	309.185
	340096	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI	DK	0	309.185	0	0	309.185	309.185
	A00	RM		0	309.185	0	0	309.185	309.185
	35	KALIMANTAN UTARA		0	335.706	0	0	335.706	335.706

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025



DS:0499-0801-0700-0804

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 7 dari 8

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 065 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2. UNIT ORGANISASI : 065.01 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
3. PAGU : Rp.681.880.285.000
(ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	417745	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN	DK	0	335.706	0	0	335.706	335.706
	A00	RM		0	335.706	0	0	335.706	335.706
	36	PAPUA SELATAN		0	491.091	0	0	491.091	491.091
	690917	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	DK	0	491.091	0	0	491.091	491.091
	A00	RM		0	491.091	0	0	491.091	491.091
	37	PAPUA TENGAH		0	216.973	0	0	216.973	216.973
	690918	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA TENGAH	DK	0	216.973	0	0	216.973	216.973
	A00	RM		0	216.973	0	0	216.973	216.973
	38	PAPUA PEGUNUNGAN		0	211.984	0	0	211.984	211.984
	690919	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	DK	0	211.984	0	0	211.984	211.984
	A00	RM		0	211.984	0	0	211.984	211.984
	39	PAPUA BARAT DAYA		0	316.923	0	0	316.923	316.923
	690916	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	DK	0	316.923	0	0	316.923	316.923
	A00	RM		0	316.923	0	0	316.923	316.923
	065.01.WA	Program Dukungan Manajemen		252.291.969	151.949.643	5.000.000	0	409.241.612	0
	01	DKI JAKARTA		252.291.969	151.949.643	5.000.000	0	409.241.612	0
	017202	SEKRETARIAT UTAMA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	KP	252.291.969	151.949.643	5.000.000	0	409.241.612	0
	A00	RM		252.291.969	151.949.643	5.000.000	0	409.241.612	0
		Target Pendapatan						457.212	

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA-065.01-0/2025

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER



A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA :

065 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

2. UNIT ORGANISASI :

065.01 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

3. PAGU :

Rp.681.880.285.000

(ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
		TOTAL		252.291.969	393.355.135	36.233.181	0	681.880.285	272.638.673
		RM		252.291.969	393.355.135	36.233.181	0	681.880.285	272.638.673
		PENDAPATAN						457.212	

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 02 Desember 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-065.01-0/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0499-0801-0700-0804

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 065 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2. UNIT ORGANISASI : 065.01 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
3. PAGU : Rp.681.880.285.000
(ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. RENCANA PER PROGRAM

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	065.01.ED	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi													
		RENCANA PENARIKAN DANA	272.638.673	17.573.332	26.235.299	22.447.400	23.545.347	22.516.831	19.852.738	22.311.641	19.823.501	22.298.026	20.741.941	23.499.042	31.793.575
2	065.01.WA	Program Dukungan Manajemen													
		RENCANA PENARIKAN DANA	409.241.612	25.074.305	31.501.943	32.821.978	35.162.529	34.117.529	34.117.529	34.117.029	34.407.614	34.504.957	34.554.912	34.410.744	44.450.545
		PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	457.212	38.101	38.101	38.101	38.101	38.101	38.101	38.101	38.101	38.101	38.101	38.101	38.101
		TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA	681.880.285	42.647.637	57.737.243	55.269.377	58.707.875	56.634.359	53.970.267	56.428.669	54.231.115	56.802.984	55.296.853	57.909.786	76.244.120
		TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	457.212	38.101	38.101	38.101	38.101	38.101	38.101	38.101	38.101	38.101	38.101	38.101	38.101

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

Rosan Perkasa Roeslani
NIP. 3174053112680002